

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SEKOLAH DASAR (SD)**

(STUDI PADA SDN BULUSARI TAROKAN KABUPATEN KEDIRI)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**TAUFIQ RAHMAN ILYAS
NIM. 0910313046**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2013

Motto

Hilangkan tradisi yang korupsi dan membodohi

Salah satu keindahan hidup ini adalah disaat aku tidak selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Selalu ada ruang harapan, penantian, senyum, dan luka. Tak tercapainya tujuan adalah simpang jalan yang membuatku menoleh pada sisi yang lain. Bukan saja pada hukum kepastian realita yang nyata, tetapi Allahlah yang sedang mangajak aku berfikir dengan caraNYA. Hingga aku memilih berfikir keras dan bangga terhadap keterbatasan diriku sendiri.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD). (studi pada SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri)

Disusun oleh : Taufiq Rahman Ilyas

NIM : 0910313046

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 18 Juni 2013

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Tjahjanulin Domai, MS.
NIP. 19531222 198010 1 001



Drs. Muhammad Shobaruddin, MA.
NIP. 19590219 198601 1 001

TANDA PENGESAHAN

Teah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Prawijaya pada :

Hari : Kamis
Targgal : 11 Juli 2013
Jarr. : 08.00 - 05.15 WIB
Skripsi etas rama : Taufiq Rahman Ilyas
Judul : Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) (Studi pada SDN
Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri)

**DAN DINYATAKAN LULUS
MAJELI SPENGUJI**

Ketua



Dr. Tjahjanuln Domai, MS.
NIP. 19531222 193010 1 001

Anggota



Drs. Muhammad Shoberuddin, M.A.
NIP. 19590219 198601 1 001

Anggota



Dr. Rati NurPratiwi, M.Si.
NIP. 195308070 197903 2 001

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si.
NIP. 19540127 198102 1 003

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 73).

Malang, 7 Juli 2013



Nama: Taufiq Rahman Ilyas

NIM : 0910313046

RINGKASAN

Taufiq Rahman Ilyas, 2013. Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD). (studi pada SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri). Dibawah bimbingan Dr. Tjahjanulin Domai, M.S., Drs. Muhammad Shobaruddin, MA.

Implementasi penyelenggaraan suatu program tidak selamanya selalu diimbangi dengan keberhasilan pada sasaran tujuan utama yang dituju. Seperti halnya implementasi penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD). Sejalan dengan program yang telah berjalan kurang lebih sekitar delapan tahun dari tahun 2005 program ini sebenarnya telah memberikan banyak kontribusi, khususnya pada layanan pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi instrument utama dalam terselenggarakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikian pada dimensi sisi yang lain masih saja terdapat permasalahan pada implementasi penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD), sehingga apa yang menjadi visi misi dari sasaran program tersebut belum mencapai keberhasilan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri tepatnya di SDN Bulusari Tarokan, Pelaksanaan program yang seharusnya menjadi input dasar terselenggarakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah justru menjadi bermasalah karena adanya perbedaan persepsi pengelola program dengan para wali murid, selain itu masih belum optimalnya pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya ditujukan kepada sasaran yang sesuai dimana sebagai pembiayaan pendidikan siswa bukan malah membiayai tenaga guru honorer dan keperluan kegiatan lain yang tidak jelas keberadaannya. Masalah transparansi mengenai pengelolaan menjadi sorotan utama karena menarik untuk diteliti apakah dan sejauh manakah peranan suatu evaluasi pada implementasi program memberikan kontribusi perbaikan sehingga memberikan suatu perubahan fundamen pada pelaksanaan program selanjutnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses evaluasi BOS sudah berpedoman pada Permendikbud 51 Tahun 2011 mengenai petunjuk teknis pengelolaan yang meliputi evaluasi pelaksanaan BOS. Adanya evaluasi program BOS di sekolah melahirkan suatu tekad yang bagus dari pihak pengelola mengenai perbaikan pada pelaksanaan program BOS di sekolah. Transparansi yang semakin jelas kepada wali murid mengenai proses pemanfaatan BOS di sekolah, beserta penjelasan mengenai pemahaman BOS sebagai subsidi umum yang mengcover biaya kegiatan belajar mengajar di sekolah secara keseluruhan. Sedangkan pada sisi partisipatif diberlakukannya evaluasi pelaksanaan BOS lebih memperbaiki pada fungsi kontrol atau peranan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan program BOS di Sekolah.

Kata kunci: Evaluasi, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

SUMMARY

Taufiq Rahman Ilyas, 2013. Evaluation Program Implementation School Operational Assistance (BOS) Elementary School (SD). (studies on SDN Bulusari Tarokan Kediri). Under counseling Dr. Tjahjanulin Domai, M.S., Drs. Muhammad Shobaruddin, MA.

Organizing the implementation of a program is not always be balanced with success on the intended target of the main objectives. As well as organizing the implementation of the School Operational Assistance (BOS) at the elementary school (SD). Consistent with the program that has been running more than about eight years from 2005, this program has actually made many contributions, particularly in the education service. School Operational Assistance (BOS) to be the main instrument in the teaching and learning activities schools. But even then on the other side dimensions there are real problems in the implementation of the School Operational Assistance (BOS) in elementary school (SD).so what is the vision and mission of the program objectives are not to achieve success. so what is the vision and mission of the program objectives are not to achieve success. As happened in Kediri regency exactly in SDN Bulusari Tarokan, the irony program implementation should be the basic input of teaching and learning in schools became problematic because of differences in perception of the program manager with the parents than it is still not optimal budget management School Operational Assistance (BOS) which should be directed to the appropriate target where as financing education students rather than teachers purposes honorary and other activities that are not apparent existence. Transparansi problem and the focus of management accountability as interesting to study whether and to what extent the role of an evaluation of the implementation of the program contribute to the improvement of the program so as to provide a fundamental change in the execution of the next program. Types of research used in the preparation of this paper is descriptive research with a qualitative approach. Source of data used are primary data and secondary data. Techniques of data collection by interview, observation, documentation and research studies used Instrumen researchers themselves, interview guidelines and other supporting devices. Analysis of the data used in this study is a model of interactive data analysis.

The research results indicate that a evaluation process based on the BOS have been Permendagri 51 Year 2011 the technical guidelines covering the management of BOS evaluation. BOS program evaluation in school gave born to a good determination of the manager regarding improvement in the implementation of the BOS program at school. Transparency is increasingly evident from student guardians regarding the utilization of BOS in school, as well as illustrate regarding BOS understanding of general subsidies cover the cost of teaching and learning in the school overall. While on the implementation of a participatory evaluation of the BOS further improve the function of the control or supervision of the process BOS in Schools program.

Keywords: Evaluation, The School Operational Assistance (BOS).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berkah-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Sholawat serta salam, semua kebaikan dunia dan akhirat tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ijin-Nya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) (studi pada SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri).**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya dimensi implementasi kebijakan publik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tersayang, Saudara saudara kerabatku yang senantiasa memberi motivasi dan do'a saat suka maupun duka.
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya Malang, Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu, khususnya Ilmu Administrasi Publik.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos, M.Si yang telah membantu serta memfasilitasi penulis hingga dapat mengikuti semua kegiatan akademik dengan lancar.
4. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Tjahtjanulin Domai, MS. dan Bapak Drs. Muhammad Shobaruddin, MA. yang senantiasa sabar memberikan kontribusi

dan bimbingan serta dukungan moral kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak dan Ibu dosen FIA UB yang telah mengajar, mendidik dan mentransfer ilmunya pada penulis selama ini.
6. Bapak Drs. Mudhofir selaku Kepala SDN Bulusari yang telah menjadi informan dengan ikhlas dalam skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2009, Teman-teman Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah mendukung terselesainya skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabatku di mana pun yang telah memberikan warna kehidupanku, dukungan, bantuan dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan karya tulis ini.

Seperti ungkapan "tidak ada gading yang tak retak". Penulis yakin bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga masukan berupa saran dan kritik yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata bila ada kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini baik materi maupun cara penulis menyajikannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tidak lain karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri.

Malang, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSUTUJUAN	ii
PERNYATAAN ORINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian.....	12
1. Kontribusi Praktis	12
2. Kontribusi Teoritis	12
E. Alur Pemikiran.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Konsep Evaluasi Program.....	15
a. Pengertian Evaluasi.....	16
b. Pengertian Program	17
c. Evaluasi Program	19
d. Dimensi dan Tahapan Evaluasi Program.....	20
e. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Program	23
f. Model Evaluasi Program.....	24
B. Penilaian Evaluasi Kinerja Program	27
a. Evaluasi Proses (Procces evaluation).....	28
b. Evaluasi Hasil (product evaluation).....	29
C. Pengawasan Proses Evaluasi Program.....	30
D. Biaya Pendidikan.....	33
a. Pembiayaan Pendidikan.....	33
b. Konsep Pembiayaan Pendidikan	34
E. Manajemen Sekolah.....	37
a. Fungsi Peran Tujuan Manajemen Sekolah	37
b. Manajemen Sumber Daya Sekolah.....	38
F. Evaluasi Manajemen BOS	38

G. Instrument Evaluasi Implementasi BOS.....	40
H. Tinjauan Hukum Mengenai BOS	44

BAB III METODE PENELITIAN 45

A. Jenis Penelitian	45
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
1. Jenis Data.....	49
2. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Instrumen Penelitian.....	53
G. Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 56

A. Profil Lokasi Penelitian	56
1. Profil Kabupaten Kediri	55
a. Sejarah Kabupaten Kediri.....	55
b. Geografi Teritorial	57
B. Profil Pendidikan Kabupaten Kediri.....	59
C. Penyajian Data dan fokus penelitian	62
1. SDN Bulusari	62
a. Visi, misi, dan tujuan SDN Bulusari	62
b. Prestasi Lulusan.....	64
c. Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan.....	64
d. Pengembangan Kurikulum	65
e. Sarana Dan Prasarana.....	66
f. Pengembangan Nilai.....	66
2. Tinjauan Mengenai Kebijakan BOS.....	67
3. Proses Evaluasi BOS.....	73
a. Supervisi Pemantauan dan Pengawasan program BOS... ..	74
b. Administrasi pelaksanaan program BOS di sekolah.....	77
1. Aspek masukan (input) pelaksanaan BOS di sekolah ...	78
2. Aspek proses (proses) pelaksanaan BOS di sekolah .	80
4. Indikator pencapaian evaluasi program BOS	81
5. Faktor penghambat dan pendukung dari Evaluasi BOS	87
D. Pembahasan dan Analisis.....	90
1. Analisis Hasil Penelitian Mengenai Proses Evaluasi.....	90
a. Supervisi Pemantauan dan Pengawasan program BOS... ..	91
b. Evaluasi Proses pelaksanaan BOS di sekolah.....	93
c. Efektifitas Evaluasi BOS di sekolah	97
2. Faktor penghambat dan pendukung terhadap evaluasi BOS.	101

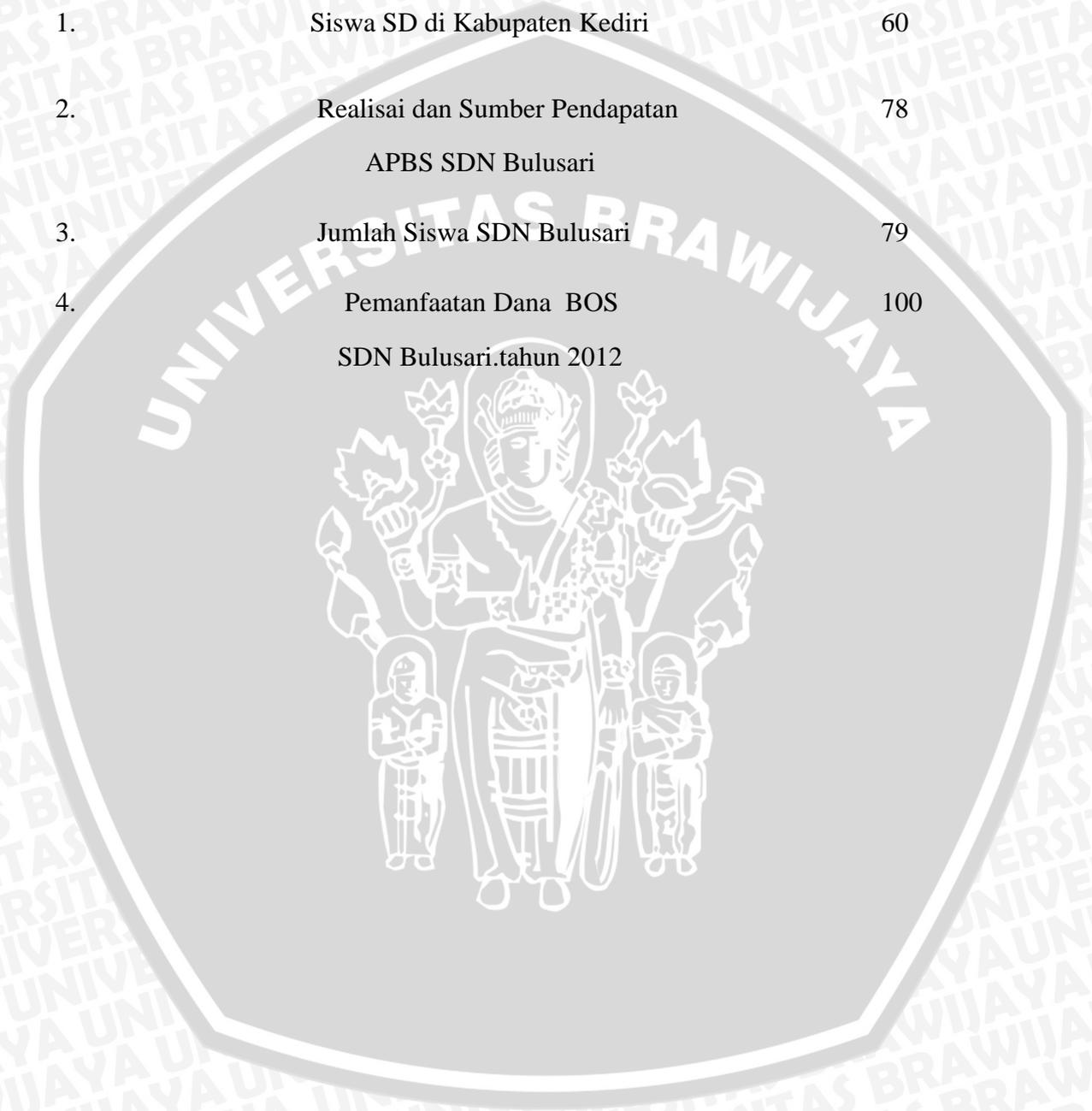
a. Faktor penghambat dan pendukung internal	101
b. Faktor penghambat dan pendukung eksternal	102
BAB V PENUTUP	103
a. Kesimpulan	103
b. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA



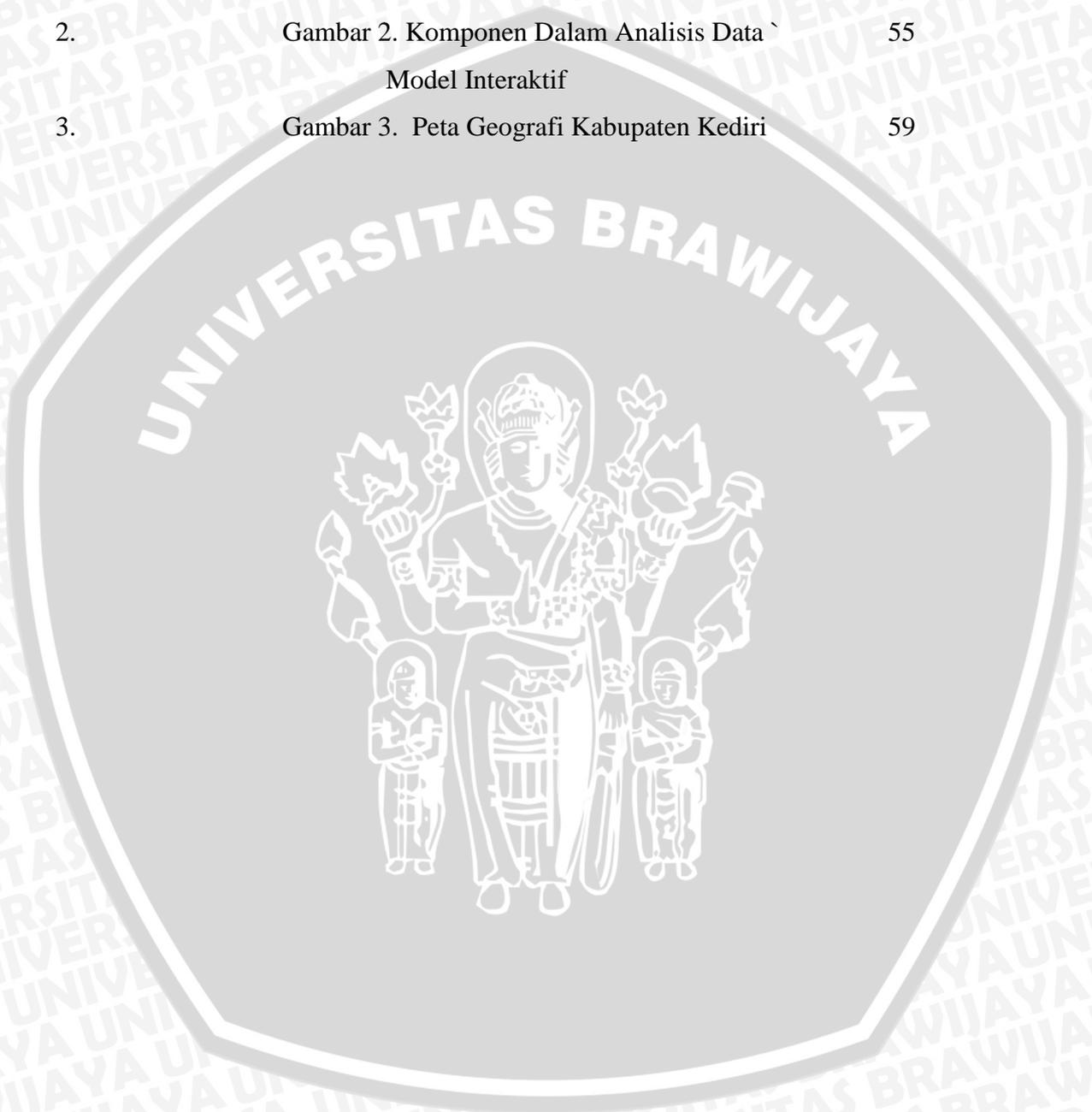
Daftar Tabel.

NO.	Tabel.	Hal.
1.	Siswa SD di Kabupaten Kediri	60
2.	Realisai dan Sumber Pendapatan APBS SDN Bulusari	78
3.	Jumlah Siswa SDN Bulusari	79
4.	Pemanfaatan Dana BOS SDN Bulusari.tahun 2012	100



Daftar Gambar.

NO.	Tabel.	Hal.
1.	Gambar 1 Ilustrasi alur konsep evaluasi	22
2.	Gambar 2. Komponen Dalam Analisis Data ` Model Interaktif	55
3.	Gambar 3. Peta Geografi Kabupaten Kediri	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah sektor wilayah yang terpenting dari sebuah input pembangunan secara umum, karena merupakan fondasi dasar fundamental yang utama dalam suatu paradigma pembangunan, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia seperti yang ada dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan system pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang sealu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil

Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain :dalam Renstra Kemendikbud (2011) menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu:

- (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan;
- (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
- (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan system pendidikan yang meliputi (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran keparadigma pembelajaran, Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan bergeser keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, (2) Perubahan pandangan tentang mengenai peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh.

Dalam rangka mewujudkan suatu cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada berbagai banyaknya kompleksitas permasalahan, baik permasalahan yang bersifat

internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi abad ke- 21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Pada hal kita tahu bahwa gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, terpuruknya kondisi *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 menempati peringkat 124 dari 187 negara. Hal ini berarti bahwa Indonesia tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Negara Malaysia (61), Negara Thailand (103) dan Negara Filipina (112). (UNDP:2012, www.google.com) Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di atas, penilaian *Human Development Index (HDI)* yang diukur dengan indikator-indikator antara lain: (1) penilaian terhadap harapan hidup, (2) tingkat keaksaraan atau melek huruf, (3) pendidikan dan (4) kemampuan daya beli masyarakat atau pengeluaran per kapita. Dari kedua indikator yaitu kesehatan dan indikator pendidikan, menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap mutu Sumber Daya Manusia. Dengan demikian rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya mutu pendidikan

masyarakat merupakan bukti belum berhasilnya pembangunan Pemerintah Indonesia bidang pendidikan. sekarang membuat kondisi ini adalah sebuah realitas yang menjadi isyarat bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul serta berdaya saing.

Berangkat dari permasalahan diatas tersebut, Pemerintah telah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Keempat program tersebut yakni untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan bantuan langsung masyarakat (BLSM). Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 Tahun 2012, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah standar biaya operasi nonpersonalia atau standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. BOS sendiri adalah merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun

demikian, ada juga beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Untuk regulasi turunnya anggaran BOS dari pusat ke daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012 dimana Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.

Sekolah yang dicakup pada sasaran program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Sejarah program ini dimulai dan dilaksanakan pertama kali pada awal bulan Juli tahun 2005 bersamaan dengan tahun ajaran 2005/2006. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin / tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Adapun ketentuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :

- a. Untuk SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agama non islam setara SD sebesar Rp Rp 580.000,-/siswa/tahun,- /persiswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 48.500,00

- b. Untuk SMP/MTs/SMPLB/SMTP/Salafiyah/sekolah agama non islam setara SMP sebesar Rp 710.000,-/siswa/tahu ,-/persiswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 59.000,00

Untuk waktu pelaksanaan program BOS tahun 2012, BOS diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012 yaitu selama 1 bulan sekali dan tiap bulan bisa langsung dicairkan untuk kegunaan pembiayaan pendidikan siswa di tahun pelajaran 2012/2013. Sementara itu mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dalam konteks ini, pada prinsipnya Program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban dana BOS yang telah diterima. Berkaitan dengan pelaksanaan program BOS, di Kabupaten Kediri yang sedang berlangsung tahun 2012 yang diterima satu bulan sekali beserta seiring berlangsungnya program selama 1 tahun hingga pada tahun 2013

sekarang ini perjalanan pelaksanaannya masih banyak mendapat kendala serta belum begitu optimal didalam proses regulasi implementasinya,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS anggaran dana BOS diterima langsung oleh masing-masing lembaga pendidikan, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Atas baik negeri/swasta melalui nomor rekening Kepala Sekolah. Permasalahan Program BOS yang terjadi di Kabupaten Kediri sendiri, ialah dimana masih banyaknya suara dari media massa dan beberapa sumber sumber informan lainnya dimana ternyata Program BOS di Kabupaten Kediri dalam proses pelaksanaannya masih belum tepat sasaran padahal secara konseptual sendiri program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu, akan tetapi sesuai dengan beberapa temuan permasalahan yang ada yakni ;

Realitas fakta kenyataannya praktek dilapangan pelaksanaan program BOS di kabupaten Kediri ternyata belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, hal tersebut dapat dibuktikan dari masih ditemukannya beberapa siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai seperti mereka tetap saja dalam memperoleh layanan pendidikan selalu dibebani dengan biaya pendidikan yang lain di luar SPP bulanan, contohnya sendiri pada tiap tahun ajaran baru sejak pendaftaran murid /siswa baru di tingkat SD Negeri memang sudah tidak dipungut biaya pembelian formulir dan SPP namun meskipun begitu masih saja ada pungutan lain yakni membayar berbagai jenis iuran yang dikenakan kepada siswa oleh sekolah dengan berbagai dalih keperluan kegiatan belajar mengajar, seperti iuran Ekstrakurikuler, Porseni, atau kegiatan kegiatan perlombaan peringatan hari besar

yang dilakukan oleh sekolah, dan tentunya masih banyak pungutan yang harus ditanggung siswa yang dilakukan oleh sekolah dengan berbagai alasan. Padahal keberadaan program BOS seharusnya dapat membantu bagi masyarakat tidak mampu yang seharusnya untuk mendapatkan bantuan biaya Pendidikan (Tabloid Diknas Kabupaten Kediri, edisi Maret 2012)

Faktor utamanya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini belum pernah diterima dan dilakukan oleh sekolah, hal ini diibaratkan sekolah seperti ibarat menerima “durian runtuh” meskipun telah dilakukan sosialisasi tetap saja sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban beserta penggunaan dana BOS yang dirasa belum efektif keberadaan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengawasan dan pengamatan langsung dari pihak sekolah sendiri pada praktek kenyataannya anggaran dana BOS ternyata dipakai untuk membayar guru tidak tetap, padahal untuk pembayaran guru bantu sendiri harusnya menggunakan anggaran Pemerintah Daerah atau alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Radar Kediri, 18 Juli 2012).

Kelemahan yang lain dari pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS yang seharusnya diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan dilapangan memperlihatkan bahwa belum sepenuhnya siswa/siswi miskin/tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS dan perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan

bantuan keuangan anggaran sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah.

Dalam praktek di lapangan pihak Kepala Sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah yang tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kredibilitas masih diragukan (Radar Kediri, 15 April 2012).

Permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar /sederajat maupun Sekolah Menengah Atas/setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru /penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan kegiatan ekstrakurikuler atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga yang berasal dari keluarga miskin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorit dengan standar nasional karena benar-benar mempunyai prestasi siswa yang bagus, namun tetap dipungut biaya tambahan.

Ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi implementasi terhadap program BOS adalah karena di daerah Kabupaten Kediri tepatnya di SDN Bulusari kecamatan tarokan berdasarkan informasi dari media lokal daerah setempat menemukan temuan adanya indikasi permasalahan pada regulasi pelaksanaan penyelenggaraan dana BOS hal ini sesuai dengan kutipan berikut :

Adanya penggunaan BOS yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOS cenderung digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas gedung dan sarana komputer sehingga kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar mengajar siswa sebagai penerima dana BOS (Radar Kediri, 17 Mei 2012)

Salah seorang wali murid yang mengeluhkan adanya pungutan yang seharusnya tidak perlu, dimana adanya iuran yang beralih untuk kegiatan intrakurikuler sains dan pengembangan pendidikan yang jumlah nominalnya memberatkan wali murid, padahal seharusnya keberadaan BOS dan APBD sudah cukup untuk mengcover kegiatan tersebut (Radar Kediri 25 Juli 2012)

Adanya temuan bahwa di SDN Bulusari terjadi kesalahfahaman pengertian mengenai pemanfaatan BOS oleh pihak pengelola dana BOS dengan para wali murid, dimana wali murid masih menganggap BOS sebagai subsidi khusus yakni diperuntukan kepada dan khusus bagi siswa miskin yang menerima padahal kegunaan BOS tersebut peranannya mencakup semua proses kegiatan pendidikan termasuk membiayai siswa miskin (Radar Kediri 1 september 2012)

Dengan melihat permasalahan diatas tentunya menarik apabila

Penulis meneliti mengenai evaluasi implementasi pemanfaatan BOS, tidak diberikannya langsung dana BOS kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola langsung oleh sekolah bersamaan dengan pengawasan dari komite sekolah, selain itu pelaksanaan program BOS setelah sekian lama dari tahun ketahun mendapatkan evaluasi tetapi kenyataannya keefektifan dari tujuan sasaran yang dituju masih belum maksimal, banyaknya tantangan dan kendala dalam transparansi serta akuntabilitas dari berbagai lembaga yang menangani masih banyak perlu dievaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga setidaknya sedikit banyak dapat mengetahui seberapa besarkah manfaat dan cakupan, pemerataan dari anggaran BOS bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu. Oleh karena

itu untuk mengetahui tingkat efektivitas capaian sasaran pelaksanaan program BOS pada SD di Kabupaten Kediri sekiranya maka dari itu perlu dilakukan kajian melalui evaluasi implementasi pemanfaatan program, dari sinilah maka penelitian ini akan mengangkat judul **Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD)** (Studi pada SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri)

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses evaluasi implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri ?
2. Faktor faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung dari evaluasi implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan SDN Bulusari Tarokan di Kabupaten Kediri ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan adalah untuk:

1. Mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi bagaimanakah proses evaluasi dari pelaksanaan program BOS pendidikan SD di Kabupaten Kediri khususnya SDN Bulusari
2. Mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari dilakukannya evaluasi

Implementasi program BOS pada pendidikan SD di Kabupaten Kediri khususnya SDN Bulusari .

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan masukan terhadap proses evaluasi implementasi program BOS sekolah dasar (SD) di Kabupaten Kediri.
- b. Sebagai masukan tambahan untuk dijadikan pertimbangan dalam evaluasi implementasi program BOS sekolah dasar (SD) di Kabupaten Kediri.

2. Kontribusi Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran pengembangan kajian Ilmu Administrasi pada umumnya dan Ilmu Administrasi Publik pada khususnya Kebijakan Program BOS Sekolah Dasar.
- b. Diharapkan dari penelitian ini, pada masa yang akan datang dapat disempurnakan dan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

E. Alur Pemikiran

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang menyajikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori yang berkenaan dengan evaluasi program, pembiayaan pendidikan, pengawasan beserta pengawasan fungsional penyelenggaraan BOS, dan mekanisme penengeloan BOS.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan metode yang akan dipakai dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan data-data dari hasil penelitian antara lain gambaran umum lokasi penelitian dan data fokus penelitian, kemudian data-data dari hasil penelitian tersebut dianalisa dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen yang dimana meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” yang berarti penilaian atau penaksiran (Arikunto dan Jabar 2010:27) Sedangkan menurut (Yunanda, 2008:65) pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” Evaluasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif.

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata -kata yang terkandung

dalam dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan (Arikunto,2007:1).

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat dalam (Arikunto dan Jabar 2004:3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh (Griffin dalam Tilaar & Nugroho, 2008:69.) menyatakan :

“Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Lebih lanjut menurut (Sudjana dalam Dimiyati dan Mudjiono, 2010:191), “dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi

dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan (Crawford dalam Dimiyati dan Mudjiono,2006:191),, mengartikan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. (Echols dan Shadily 2000 : 76) memaparkan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses”.

b. Pengertian Program

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila ”program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi

yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

- a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. (Sudjana 2009:35) memaknai bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana

c. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan

keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan. (Ralp Tyler,1950 dalam Arikunto, 2007:38) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan (Cronbach dan Stufflebeam dalam Arikunto, 2007:78) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. (Arikunto dan Jabar 2004:14) Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan. Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

d. Dimensi dan tahapan Evaluasi Program

Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan aspek-aspek dari obyek yang akan evaluasi. Menurut (Stake, 1967, Stufflebeam, 1959, Alkin 1969 dalam Arikunto, 2008:49) telah mengemukakan bahwa evaluasi berfokus pada empat aspek yaitu :

- a. Konteks
- b. Input

c. Proses implementasi

d. Produk

Bridgman dan Davis (dalam Yusuf, 2000:76) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu :

a, Indikator *input*

b. Indikator *process*,

c. Indikator *outputs*

d. Indikator *outcomes*.

Menurut (Setiawan 2007:21) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Bapenas, tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Menurut (Setiawan, 2007:62) dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu :

a. indikator masukan (*input*),

b. Proses (*process*)

c. keluaran (*output*),

d. indikator dampak atau (*outcome*)

Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan program yang mencakup :

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*EX-ANTE*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan

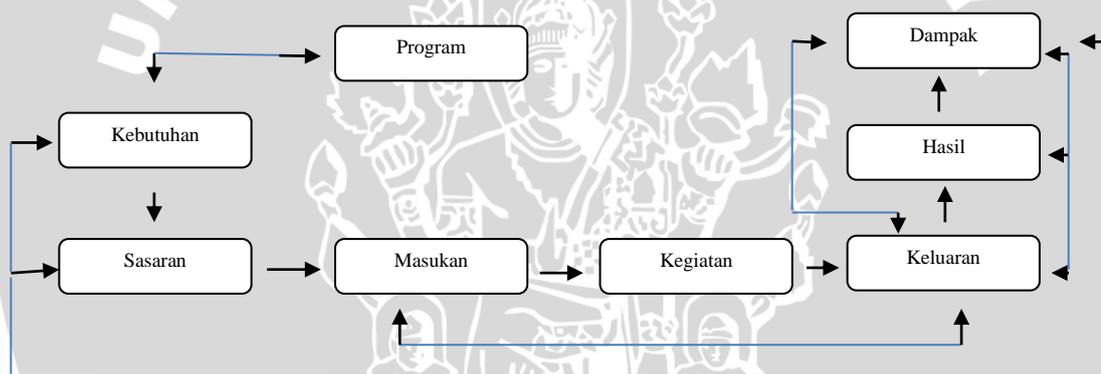
kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*ON-GOING*). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (*EX-POST*) pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selanjutnya terdapat perbedaan metodologi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu : Penilaian indikator kinerja program berdasarkan keluaran dan hasil studi evaluasi program berdasarkan dampak yang timbul. Cara pertama dilakukan melalui perbandingan indikator kinerja sasaran yang direncanakan dengan

realisasi, informasi yang relevan dan cukup harus tersedia dengan mudah sebelum suatu indikator kinerja program dianggap layak.

Cara yang kedua dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat lebih mendalam (*in-depth evaluation*) terhadap hasil, manfaat dan dampak dari program yang telah selesai dilaksanakan. Hal yang paling penting adalah mengenai informasi yang dihasilkan dan bagaimana memperoleh informasi, dianalisis dan dilaporkan. Informasi harus bersifat independen, obyektif, relevan dan dapat diandalkan. Untuk lebih jelas tahapan evaluasi sebagaimana gambar berikut :



Gambar.1.
Ilustrasi alur konsep evaluasi

e. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Menurut (Weiss dalam Sudjana 2006:34) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah

“The purpose of evaluation research is to measure the effect of program against the goals it set out accomplish as a means of contributing to subsuquest decision making about thr program and improving future programming”.

Ada empat hal yang ditekankan pada rumusan tersebut, yaitu : (1) menunjuk pada penggunaan metode penelitian, (2) menekankan pada hasil suatu program, (3) penggunaan kriteria untuk menilai, (4) kontibusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang. Selain itu, menurut (Crawford dalam dalam Sudjana, 2006:13), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahanbahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu roses pengumpulan data yang sistematis.

f. Model Evaluasi Program

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli/pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya. Model ini dianggap model standar. Disamping itu ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakanya serta kepentingan atau penekannya atau dapat juga disebut sesuai dengan paham

yang dianut yang disebut pendekatan atau *approach*. Ada banyak model evaluasi antara lain :

1. Model Evaluasi CIIP

Model ini menurut Stufflebeam (dalam Yusuf, 2000:45) pendekatan yang berorientasi pada pemegang keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk menolong administrator dalam membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dia membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, membagi evaluasi menjadi empat macam yaitu :

- a. *Contact evaluation to serve planning decision*, konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.
- b. *Input evaluation, structuring decision*, evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
- c. *Process evaluation, to serve implementing decision*, evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauhmana rencana telah dapat diterapkan ? apa yang harus direvisi ? Begitu pertanyaan tersebut terjawab prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.



d. *Product evaluation, to serve recycling dicion*, evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya, apa hasil yang telah dicapai ? apa yang dilakukan setelah program berjalan. Keempat hal tersebut di atas merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian apabila evaluator sudah menentukan model CIPP akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponennya. Model ini sekarang telah disempurnakan dengan satu komponen O singkatan dari *outcomes*, sehingga menjadi model CIPPO.

2. Model Evaluasi UCLA

(Alkin,1969 dalam Yusuf, 2000:71) menulis kerangka evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih alternatif, mengemukakan lima macam evaluasi, yakni :

- a. *Sistem assessment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem,
- b. *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program,
- c. *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan,

d. *Program improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan ? apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga,

(Sudjana, 2006:51) berpendapat bahwa model evaluasi terdapat enam model, yaitu :

- (a) Model evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan (jenis inilah yang terbanyak digunakan),
- (b) Model evaluasi terhadap unsur-unsur program,
- (c) Model evaluasi terhadap jenis/tipe kegiatan program,
- (d) Model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program,
- (e) Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program,
- (f) Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program.

Kegunaan utama model ini untuk mengkaji sejauhmana suatu Lembaga Penyelenggara dan Pengelola Pelayanan program Pendidikan kepada masyarakat telah berhasil dalam melaksanakan misinya. Dalam konteks ini maka evaluasi pengaruh diawali dengan mempelajari misi yang terdapat dalam program dan mengidentifikasi hasil-hasil utama program yang ingin dicapai dan/atau hasil-hasil program yang tidak tercapai, model ini pada awalnya dikembangkan untuk mengevaluasi proyek-proyek pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri atas :

- a. Pemantauan proyek untuk mengetahui efisiensi proyek-proyek tertentu,
- b. Evaluasi tentang keberhasilan atau kegagalan sementara suatu program.
- c. Evaluasi yang mengkaji tujuan-tujuan jangka panjang suatu program dengan melihat keberhasilan dan kegagalan program dalam jangka panjang tersebut.

B, Penilaian Evaluasi Kinerja Program.

Secara umum, untuk mengukur penilaian evaluasi kinerja program menurut (Keban, 2006:222) telah dikembangkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yang menilai dari proses dan pendekatan yang berorientasi pada hasil atau manfaat yang diberikan terhadap adanya evaluasi program tersebut. Kombinasi dari kedua tolak ukur diatas dapat dilihat dari prinsip good governace yang saat ini sedang dipromosikan untuk diterapkan di semua tataran pemerintahan.

Didalam pendekatan proses, fokus utamanya ialah melihat pada penerapan cara untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan menjadi pusat perhatian penilaian. Parameter utama yang sering digunakan ialah kriteria pada efisiensi suatu evaluasi terhadap suatu program tersebut berjalan.

Sementara itu, dalam pendekatan hasil lebih menekankan pada ketepatan hasil yang sesuai dengan harapan rencana atau secara populer disebut dengan kriteria efektifitas.

a. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau implementasi program. Evaluasi proses dilakukan dengan mencatat atau mendokumentasikan setiap kejadian dalam pelaksanaan kegiatan, memonitor kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghambat dan menimbulkan kesulitan yang tidak diharapkan, menemukan informasi khusus yang berada diluar rencana; menilai

dan menjelaskan proses secara aktual. Selama proses evaluasi ,evaluator dituntut berinteraksi dengan staf pelaksana program secara terus menerus (Endang Mulyatiningsih, 2011: 130-131).

Pelaksanaan kegiatan evaluasi program BOS memerlukan suatu strategi atau metode-metode yang efektif dan efisien. Tidak jarang suatu perencanaan evaluasi itu baik, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan semula karena semata-mata terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan metode pelaksanaan evaluasi program BOS, Gibson and Mitchell (Arikunto, ,2011: 122) mengemukakan tiga rmacam metode evaluasi seperti berikut:

1. ***Before and After Method:*** metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai melalui suatu kegiatan tertentu, pada waktu tertentu. Caranya adalah membandingkan hasil berdasarkan tolak ukur indikator sebelum dan setelah kegiatan dilakukan, dalam pelaksanaannya sering menggunakan *pengawasan monitoring*.
2. ***Comparison Method:*** yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan indikator keberhasilan terdahulu dengan proses dari tujuan atau sasaran suatu program yang menilai dari pendekatan efektifitas keberhasilan. Dengan kata lain, teknik ini dilakukan dengan cara membuat dua kondisi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama.
3. ***The How do We Stand Method:*** yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hasil-hasil program yang diharapkan

sesuai dengan karakteristik dan kriteria keberhasilannya. Metode ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi rumusan program, kondisi-kondisi atau komponen-komponen yang mendukung, pelaksanaannya (interaksi antara komponen-komponen itu, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak)

b. Evaluasi Hasil (Product Evaluation)

Tujuan utama evaluasi produk adalah untuk mengukur, menginterpretasikan dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh program, yaitu apakah telah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum (Endang Mulyatiningsih, 2011: 132).

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 22), menyatakan ada empat kemungkinan kebijakan yang dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu:

- a. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
- b. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
- c. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.

- d. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

C. Pengawasan Evaluasi Program

1. Definisi dan Tujuan Pengawasan

Pada setiap organisasi, baik organisasi publik maupun bisnis, jalan operasional organisasi selalu tidak lepas dari adanya fungsi pengawasan. Baik buruknya kinerja suatu organisasi juga dapat bergantung dari efektif tidaknya fungsi pengawasan pada organisasi tersebut. Pengawasan menurut Manullang (1997:36) dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sementara Siagian (2008:112) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Lubis (1985:154) memberikan pengertian pengawasan sebagai kegiatan-kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Selanjutnya Mc. Farland seperti yang dikutip Handayani (1990:143) memberikan definisi tentang pengawasan (controlling) sebagai *"...the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders,*

objectives, or policies”. Jadi pengawasan dimaksudkan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Dengan demikian yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diikuti dengan adanya perbaikan-perbaikan terhadap adanya penyimpangan atau kesalahan yang ditemukan sehingga pelaksanaannya masih tetap sesuai dengan rencana.

Pengawasan biasanya bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau juga untuk meminimalisir adanya penyimpangan. Seperti yang dikemukakan oleh Handayani (1990:143) bahwa “pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan”.

Menurut Handayani (1990:144) fungsi (tujuan) pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Sementara menurut Siagian (2008:113) secara umum tujuan dari pengawasan meliputi:

- a. Bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sesuai dengan pola yang digariskan sebelumnya.
- b. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana.
- c. Bahwa seorang dapat sungguh-sungguh ditempatkan sesuai bakat keahlian dan pendidikan serta pengalaman dan usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinyu, dan sistematis.
- d. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar supaya sehemat mungkin.
- e. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam rencana.
- f. Bahwa tidak terdapat penyimpangan atau penyelewengan dalam menggunakan kekuasaan, kedudukan, maupun terutama keuangan.

Dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dari pengawasan itu adalah mengusahakan apa yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut maka perlu dilakukan pengawasan sejak pertama saat suatu rencana dijalankan.

C. Biaya Pendidikan

1.. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah, analisis efisiensi keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber sumber keuangan sekolah dan (output) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan (unit cost) per siswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurung waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jajang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternative kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Nanang 2004, 32).

Di dalam menentukan biaya satuan biaya pendidikan terdapat dua pendekatan (Gaffar,2000:73) yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan penghitungan pada pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Sumber bantuan dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin, anggaran pembangunan, dana penunjang (DPP), Dana BP3, Donatur, pinjaman , dan lain lain yang dianggap sah oleh Pendanaan pendidikan pada dasarnya besumber dari pemerinatah, orang tua, dan masyarakat. Sejalan dengan adanya menejemen berbasis sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan emncari sumber sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponaen pendidikan yang digunakan oleh murid.

2. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Teori Taksonomi Pendidikan mengajarkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak terletak pada tiga pihak, yaitu pada pemerintah, sekolah dan masyarakat. Pemerintah menyelenggarakan system pendidikan, sekolah secara teknis mengajarkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan kepada siswa, serta masyarakat sebagai lingkungan di mana anak didik tinggal, maka bertanggung jawab membentuk kepribadian yang diharapkan sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial

yang berlaku (Setyasih dalam Rosalina 2008:32). Tanggung jawab ini tentu saja termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan – baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. (dalam Gaffar,2000:10) yang dimaksud pembiayaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sedangkan (Sudjana, 2002 :36) mengartikan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan guna terselenggaranya proses pendidikan yang diinginkan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, yang dimaksud masyarakat adalah penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, peserta didik, orang tua murid dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung

(*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Nanang, 2004:23) Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen biaya terdiri dari lembaga jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan ini sering disebut "Income Forgone" yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau mengikuti study. Sebagai contoh, seorang lulusan SMP yang tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan SMA, jika ia bekerja tentu memperoleh penghasilan dan jika ia melanjutkan besarnya pendapatan (upah,gaji) selama tiga tahun belajar di SMA harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap

tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu ke waktu.

Menurut (Nanang, 2004:78) Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, dan pendataan. Semua pembiayaan diarahkan untuk kelancaran tugas dan memaksimalkan fungsi peran sekolah.

D. Menejemen sekolah

1. Fungsi dan peran tujuan sekolah

Dalam peningkatan keberhasilan suatu penyelenggaraan pendidikan sekolah tentunya tak bisa terlepas dari suatu menejemen sekolah. Fungsi dan peran serta dari tujuan sekolah sendiri yakni menciptakan menejemen sekolah yang berbasis pada pelayanan pendidikan yang optimal bagi siswa selaku objek dari sasaran fokus peran menejemen pendidikan agar supaya melahirkan sebuah sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya masing masing (Fattah, 2006 : 58). Penyelenggaraan pendidikan sendiri akan dibilang gagal apabila sekolah selaku fasilitator tidak mampu menciptakan pelayanan pendidikan yang kondusif, dimana masih adanya kekurangan kekurangan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah yang disebabkan oleh

terbatasnya dana operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tanpa adanya manajemen dan administrasi sekolah maka kemungkinan sekali segala peningkatan suatu mutu penyelenggaraan pendidikan akan gagal sama sekali. Oleh sebab itu masalah pada manajemen pendidikan yang sangat berperan penting apakah dalam suatu proses penyelenggaraan pendidikan akan lebih baik atau tidak keberadaannya.

2 Manajemen Sumber Daya Sekolah.

Menurut (Nanang, 2004:51) konsep dasar dan kajian kritis analisis *financial resources sekolah* sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan dapat disimpulkan bahwa sumber dana, SDM dan *stakeholders disekolah* merupakan tiga faktor yang sangat penting dan terkait langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan di sekolah. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu dari kebijakan publik sehingga *stakeholders* juga harus diperhatikan keberadaannya. selain faktor utama, yaitu: sumber dana dan SDM di sekolah.

E. Evaluasi Manajemen Program BOS

Efektivitas dari suatu program dan implementasinya sering dinilai tidak hanya dari keberhasilan program dan implementasi tersebut mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkannya. Akan tetapi juga melalui adanya perubahan-perubahan pada kelompok sasaran yang mengiringinya. Meningkatnya mutu pendidikan merupakan salah satu perwujudan manfaat dari program Subsidi BOS. Dengan demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa

program berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.

Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberi sanksi kepada pihak yang melanggarnya. Pemerintah Daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Departemen Pendidik Nasional belum mencukupi. Program BOS untuk jenjang SD di Kabupaten Kediri adalah ditujukan pada semua SD Negeri dan beberapa SD Terbuka. Dengan BOS dari pemerintah pusat dan subsidi BOS dari pemerintah Kabupaten Kediri diharapkan pada akhir tahun 2012, program wajib belajar 9 tahun dapat dituntaskan dan kemudian segera dilanjutkan dengan program wajib belajar 12 tahun atau setingkat sekolah lanjutan atas.

Dalam rangka mengetahui efektivitas implementasi pemanfaatan BOS (Tilaar & Nugroho 2008:55), maka dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) aspek substansi meliputi variabel yang menjadi target program salah satunya yaitu meningkatkan mutu pendidikan dasar 9 tahun,

dan (2) aspek manajerial yaitu sejauhmana program Subsidi BOS dikelola dan diimplementasikan

F. Instrument Evaluasi Implementasi Program BOS:

1. Komunikasi

Yang dimaksudkan komunikasi di sini adalah penyampaian pesan informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut berisi tentang tujuan, hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan, dan lain sebagainya. Komunikasi harus terbangun dengan baik antara pihak-pihak yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi adalah *transmission* (cara penyampaian), informasi; *clarity* (kejelasan) informasi; serta *consistency* (konsistensi) dalam penyampaian informasi. Jika suatu pesan atau informasi disampaikan dengan cara yang tidak tepat, maka dapat menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*) yang berakibat pada kegagalan pelaksana dalam menterjemahkan kebijakan di lapangan. Atau dengan kata lain pesan yang dikirimkan oleh pembuat kebijakan dilaksanakan menyimpang dari yang diinginkan. Menurut (Tilaar & Nugroho, 2008:117) distorsi ini disebabkan oleh praktek komunikasi *indirect* (tidak langsung). Informasi yang melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi, dan keengganan para pelaksana untuk mengetahui lebih lengkap pesan yang disampaikan dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi.

Jika komunikasi telah terbangun dengan baik, maka kejelasan pesan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Cara yang



benar dan efisien dalam menyampaikan informasi bukan suatu garansi bahwa informasi akan dipahami dengan baik oleh si penerima pesan. Maka dari itu, pesan harus jelas (*clarity*), mudah dipahami dan diimplementasikan. Kejelasan tidak identik dengan informasi yang berlebihan. Justru informasi yang berlebihan kadang-kadang akan mengaburkan kejelasan. Informasi yang berlebihan, (Edwards III dalam Tilaar & Nugroho, 2008:97) menyebutnya *overly specific instructions*, menghilangkan fleksibilitas (kreativitas) yang akhirnya membuat kebijakan berjalan kaku. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan telah dilakukan dengan cara yang tepat, mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut tidak ada konsistensi antara butir perintah yang satu dengan yang lainnya, maka akan membuat bingung para pelaksana kebijakan. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan dengan penafsirannya sendiri-sendiri. Komunikasi disini bisa dikembangkan lebih jauh bukan saja penyampaian program kerja kepada struktur organisasi pelaksana. Tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada warga sekolah dan masyarakat. Hal ini lazimnya disebut sosialisasi. Menurut (Tilaar & Nugroho, 2008:21) dalam hal komunikasi, para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka kerjakan. Untuk dapat mengetahui dengan baik, maka perintah yang mereka terima (baik yang dituangkan dalam keputusan-keputusan maupun dasar hukum lainnya) haruslah jelas. Ketidajelasan informasi tentu saja membawa akibat bagi

hasil pelaksanaan kebijakan. Selain tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan informasi juga bisa mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi (*unanticipated change*).

2.Sumber-sumber

Sumber-sumber ini meliputi sumber – sumber yang dapat mendukung evaluasi implementasi suatu program. Dalam implementasi program seringkali dibutuhkan sumber-sumber pendukung, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Yang termasuk sumber-sumber tersebut antara lain staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian serta keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan, adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana .

Menurut (Tilaar & Nugroho, 2008:53) mengemukakan bahwa evaluasi pada implementasi suatu program akan dapat berjalan efektif, apabila aparat pelaksanaan mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan mengaktualisasikan rencana/program kedalam bentuk pelayanan publik. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bias melakukan pengawasan dengan baik. Selain staf atau birokrat yang memiliki kualitas dan kuantitas memadai, informasi merupakan sumber daya yang mendukung

tercapainya tujuan-tujuan dalam implementasi suatu kebijakan. Informasi yang dimaksudkan adalah terutama tentang cara dan data yang dapat mendukung implementasi dengan baik. Kadang-kadang pelaksana tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang bagaimana suatu kebijakan harus diimplementasikan.

Hal ini akan dapat mengakibatkan implementasi suatu kebijakan tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, karena pelaksana menafsirkan cara sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah. Masalah lain yang menghambat implementasi bisa juga disebabkan karena tidak adanya informasi mengenai data pendukung yang valid. Jika hal ini berkaitan dengan pemberian subsidi berupa uang atau barang, maka jika data yang diperoleh terlalu banyak akan terjadi pemborosan, sebaliknya jika berdasarkan informasi data yang diperoleh terlalu jauh lebih sedikit, dapat menimbulkan kekacauan. Sumber daya berikutnya adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor pelaksanaan.

G. Landasan hukum mengenai kebijakan beserta mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 diatur dalam tiga Peraturan Menteri yakni antara lain :

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:1). Metode merupakan suatu cara atau upaya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Diungkapkan oleh Bogman dan Taylor dalam buku karya Bagong Suyanto (2008:166) metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah yang disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya serta metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2008:8)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisa data kualitatif yang mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada

masa sekarang yang tidak dibuktikan dengan angka-angka melainkan dengan uraian-uraian.

Kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala di masyarakat. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang diidentifikasi di atas didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti dokumen atau laporan-laporan yang terkait baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk angka-angka.

Dalam penelitian ini peneliti hendak mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja dari Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai suatu lembaga/badan pengawasan terhadap unit-unit kerja pemerintah daerah. Dengan demikian maka penggunaan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang cocok untuk mengetahui tentang “ Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) (Studi Pada SDN Bulusari Kabupaten Kediri).

A. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2012:94) penetapan fokus penelitian memiliki 2 (dua) maksud atau tujuan, yaitu :

1. Penetapan fokus akan membatasi studi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang itu sendiri. Artinya dengan adanya fokus, maka penentuan tempat penelitian menjadi layak.
2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan pengeluaran (*inclusia exckusia criteria*) untuk menyaring suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Artinya, peneliti melakukan pemilihan data yang relevan dengan penelitian ini ketika peneliti mengalami banjir data.

Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa adanya fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mengambil data yang relevan, serta mengolahnya hingga menjadi sebuah kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka fokus merupakan pokok permasalahan awal yang dipilih untuk diteliti. Penetapan fokus penelitian mengungkapkan tentang substansi dari data yang dikumpulkan dan dalam pengumpulan data tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan di lokasi penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Proses evaluasi implementasi program BOS
 1. Supervisi pemantauan dan pengawasn implementasi program BOS
 - Pemantauan dan pengwasan internal
 - Pemantauan dan pengawasan eksternal
 2. Pelaksanaan evaluasi program BOS di sekolah
 - aspek masukan (input)

1. Jumlah anggaran
2. Jumlah siswa di sekolah
3. SDM pelaksana program BOS di sekolah

- Aspek proses (Proses)

1. Pengelolaan atau proses penyelenggaraan program BOS di Sekolah

b. Indikator pencapaian evaluasi BOS di Sekolah

- Indikator pada pencapaian kualitas mutu pendidikan di sekolah
- Indikator pada peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap sarana dan prasarana di sekolah
- Indikator pada peningkatan layanan pendidikan siswa
- Pemahaman wali murid mengenai masalah persepsi penggunaan BOS di sekolah

c. Faktor penghambat dan pendukung evaluasi implementasi program BOS

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Kediri. Situs penelitian adalah tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek

yang diteliti untuk dapat memperoleh data yang valid dan akurat. Di sini yang menjadi situs penelitian adalah SDN Bulusari Tarokan Gringging di Kabupaten Kediri.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh. (Arikunto, 1998:114)

Menurut Lofland & Lofland (dalam Moleong 2005:157) , sumber data dalam penelitian kualitatif adalah:

"Kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Berkaitan dengan hal tersebut sumber data yang dimaksud adalah menyangkut sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya dan memperpadat informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain sumber data adalah menyangkut orang atau pihak yang akan menjadi narasumber".

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh hasil penelitian yang valid akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data penelitian akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari informan ataupun wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah:

- a) Pengelola Program BOS di SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri..
- b) Wali murid SDN Bulusari Tarokan di Kabupaten Kediri..

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer berupa laporan-laporan, dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah:

- a) Laporan Tutup Buku dan rekap RAPBS Tahun 2012 mengenai pelaksanaan BOS di SDN Bulusari Tarokan Gringging Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data

Sumber data menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif dalam Moleong (2009:157) adalah:

”Kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.”

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Informan

Data diperoleh langsung dari sumber asli sehubungan dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah:

a.) Kepala Tim pelaksana BOS Diknas Kabupaten Kediri Suharyanto SPD, MPD, Bapak Mudhofir SPD. selaku Kepala sekolah SDN Bulusari, Bapak Wardoyo selaku Komite sekolah SDN Bulusari, Dra. Naniek Sukamti Bendahara sekolah SDN Bulusari, beserta para wali murid dari siswa SDN Bulusari.

b.) Dokumen Dokumen.

Data ini merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi berupa Laporan Tutup Tahun Pemanfaatan Anggaran BOS tahun 2010 sampai 2012 SDN Bulusari Kabupaten Kediri

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Wawancara menurut Moleong (2009:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para informan yang telah tertulis pada data primer.

2. Observasi (Pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti agar memperoleh data yang sebenarnya yaitu dengan cara peneliti mengamati langsung proses evaluasi implementasi BOS di SDN Bulusari Kabupaten Kediri.

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip resmi, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Semua dokumen tertera pada data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu sendiri) sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi

pelopor hasil penelitiannya (Moleong, 2005:168). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasution (dalam Sugiyono, 2008: 223) yang menyatakan bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti sendiri, merupakan instrumen yang paling penting dalam pengumpulan data. Peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Perangkat penunjang lain, meliputi buku catatan, alat tulis, dan alat bantu lain untuk merekam dan mencatat data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data

Analisa diperlukan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman dalam (Sugiyono, 2012:92) yang terdiri dari 3 komponen yang saling berkesinambungan, yaitu :

- 1.Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

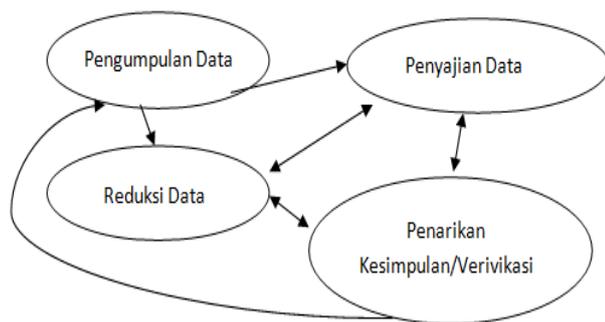
Penyajian data merupakan penyusunan informasi-informasi yang didapat dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

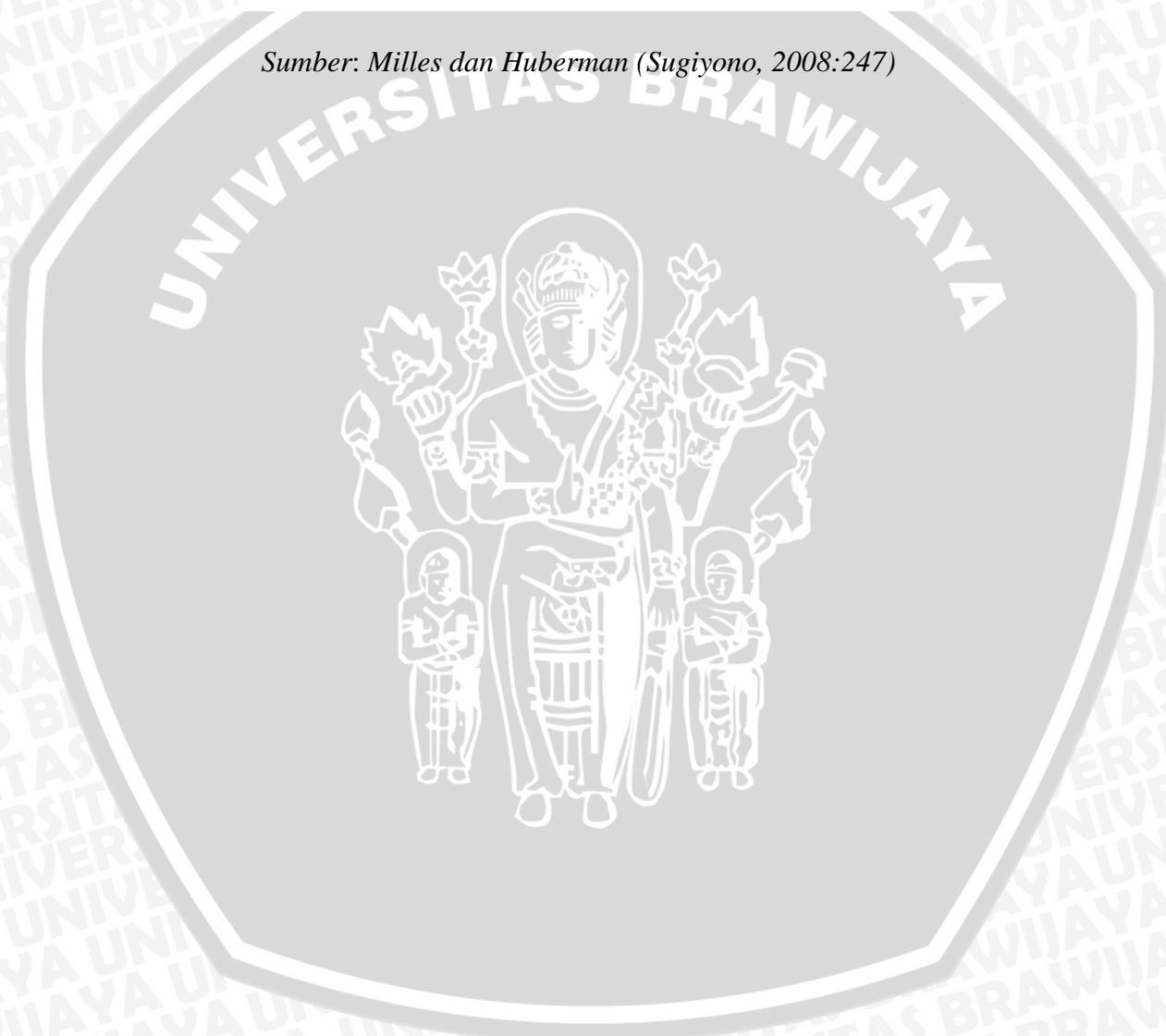
Setelah data dikumpulkan dan dianalisa, maka dapat ditarik kesimpulan. Namun, kesimpulan akhir itu tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut diverifikasi yaitu berupa pengumpulan data atau dapat juga dengan melakukan salinan dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya data harus diuji kevaliditasannya supaya kesimpulan yang diambil lebih kuat.

Gambar 2.

Komponen dalam analisis data model interaktif



Sumber: Milles dan Huberman (Sugiyono, 2008:247)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Kediri

a. Sejarah Kabupaten Kediri

Berbicara mengenai sejarah Kab Tentang Pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan BOS yang di dalamnya meliputi evaluasi melalui tahapan pemantauan dan supervisi. upaten Kediri pada dasarnya sangat dekat dan erat kaitannya dengan sejarah raja-raja Jawa. Khususnya kerajaan Kediri, seperti Joyoboyo, Dhaha (Raja Panjalu), Empu Sendok, R. Wijaya, Airlangga, dan Gajah Mada. Masyarakat Kediri mendasarkan hidupnya pada bercocok tanam dan membangun industri yang berbasis agraris. Filosofi-filosofi Jawa dan perdamaian adalah fokus dalam kehidupan masyarakatnya. Nama Kediri berasal dari batu tulis “Harinjing ” yang ditemukan di desa Siman, Kabupaten Kepung. Diawali dengan tokoh yang bernama Bagawanta Bari berhasil menyelesaikan bendungan sungan Sarinjing untuk menyuburkan tanah pertanian. Karena jasanya, dia menerima “Tanah Pradikan” di desa Culanggi (Besowo, Kabupaten Kepung) pada 25 Maret SM. Hadiah tersebut diberikan oleh raja Rake Layang Dyah Tulodong yang menguasai Kerajaan Mataram. Karena kejadian tersebut, hari jadi Kediri ditetapkan tanggal 25 Maret setiap tahunnya. Wilayah Kabupaten Kediri pernah menjadi bagian berbagai kerajaan penting di Pulau Jawa sejak perpindahan Kerajaan Medang dari tanah Mataram ke timur, menjelang milenium kedua. Kerajaan Kadiri atau Panjalu, dengan lokasi kraton di Daha kemudian menjadi penerus kerajaan Medang setelah pembagian wilayah sepeninggal Prabu Airlangga. Puncak kejayaann Kediri adalah ketika di bawah pemerintahan Raja

Jayabaya, pengaruhnya telah sampai hingga ke Ternate. Situs Tondowongso, yang ditemukan pada awal tahun 2007 dan berlokasi sekitar 15 km timur Kota Kediri sekarang, memberikan indikasi bahwa dahulunya merupakan kompleks pemukiman penting.

b.Geografi dan Teritorial

Kabupaten Kediri sendiri merupakan salah satu Kabupaten yang berada di propinsi Jawa Timur, secara geografis diapit dua gunung besar yaitu Gunung Kelud disebelah timur dan Gunung Wilis disebelah barat. Adapun kondisi geografis pada bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri adalah DAS Brantas, yang membelah wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian dengan hamparan persawahan ditepian Sungai Brantas yang sangat subur. Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak antara $111^{\circ} 47' 05''$ sampai dengan $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ sampai dengan $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan, Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten, yakni :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Jombang dan Nganjuk
- b. Sebelah Timur Kabupaten Jombang dan Malang
- c. Sebelah Selatan Kabupaten Tulungagung dan Blitar
- d. Sebelah Barat Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk

Kabupaten Kediri terdiri dari 26 Kecamatan, 343 Desa dan 1 Kelurahan, dengan luas wilayah $\pm 1.386,05$ km², Masyarakat Kabupaten Kediri masih bercorak agraris dimana sebagian besar penduduk masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian.

Jumlah penduduk Kabupaten Kediri mencapai $\pm 1.475.815$ jiwa. Perkembangan total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kediri selama periode lima tahun terakhir (2008-2012) menunjukkan angka kenaikan. Tahun

2010 total PDRB nya atas dasar harga berlaku sebesar Rp 12,40 triliun atau naik 9,97 persen jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang besarnya Rp 8,8 tryliun. Kenaikan total PDRB tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beberapa sektor di dalamnya, terutama sektor Pengangkutan dan Komunikasi (14.75 persen), sektor jasa-jasa (13.71 persen), sektor Listrik, gas dan air (13.80 persen) , sektor industri pengolahan (13.21 persen), Sektor bangunan (12,97 persen), sektor perdagangan hotel dan restoran (10.00 persen), sektor pertambangan dan penggalian (9.47 persen), sektor keuangan sewa dan jasa perusahaan (9,29 persen), dan Sektor Pertanian (6,98 persen).

Di sini juga terdapat industri rokok domestik. Perusahaan rokok Gudang Garam yang merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia, sekitar 16.000 warga Kediri menggantungkan hidupnya kepada perusahaan ini, selain itu Gudang Garam menyumbangkan pajak dan cukai yang relatif besar. Kabupaten Kediri berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek. Mulai pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga.



Gambar.2
Peta Kabupaten Kediri

d. Profil Pendidikan Kabupaten Kediri

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri tahun 2012 bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Kediri tercatat sebesar $\pm 1.275.815$ jiwa dengan tingkat pendidikan yang sangat beragam yakni dari jumlah tersebut sebanyak 124.878 orang berpendidikan Sekolah Dasar dan sebesar 64.304 orang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama sedangkan sebesar 35.573 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat, sebesar 56.021 orang berpendidikan Akademi setingkat sarjana muda dan 58,138 orang berpendidikan tinggi atau Universitas. Karena tema yang akan dibahas pada penulisan karya ilmiah ini merupakan pendidikan sekolah dasar (SD) maka untuk mengetahui secara detail gambaran penduduk Kabupaten Kediri berdasarkan tingkat pendidikan sekolah dasar dapat dilihat pada tabel tersebut di bawah ini :

Tabel.1.Jumlah Siswa SD
Di kabupaten Kediri

No.	Kecamatan	SD		
1.	Mojo	3567		
2.	Semen	1580		
3.	Ngadiluwih	5789		
4.	Kras	7589		
5.	Ringin Rejo	7895		
6.	Kandat	8092		
7.	Wates	4575		
8.	Ngancar	2517		
9.	Plosoklaten	3750		
10.	Gurah	8648		
11.	Puncu	7345		
12.	Kepung	3458		
13.	Kandangan	8213		
14.	Pare	7950		
15.	Badas	2467		
16.	Kunjang	3522		
17.	Plemahan	5876		
18.	Purwoasri	4890		
19.	Papar	5750		
20.	Pagu	3512		

21.	Kayen Kidul	2568		
22.	Gampeng Rejo	3656		
23.	Ngasem	2759		
24.	Banyakan	1987		
25.	Grogol	3723		
26.	Tarokan	3799		
	Jumlah	124878		

Sumber : Data Dinas Pendidikan jumlah siswa SD di kabupaten Kediri.

Guna menunjang pembangunan Sumberdaya Manusia di Kabupaten Kediri bidang pendidikan menjadi perhatian yang cukup besar untuk keperluan ini Pemerintah Kabupaten Kediri bersama sama dengan instansi terkait dan pihak swasta selalu memberikan dorongan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Dorongan yang ada, bukan hanya memberikan bantuan dan penyuluhan tetapi juga menumbuh kembangkan semangat membangun sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan. Seperti halnya pembangunan sarana pendidikan dari seluruh jenjang pendidikan, hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri telah mempunyai komitmen dalam memperhatikan kebutuhan penduduknya dalam bidang layanan pendidikan. Pembangunan pada sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesias yang cerdas dan trampil yang diikuti oleh rasa percaya diri serta sikap inovatif, disamping itu merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dalam lingkungan keluarga, sekolah dan

masyarakat. Perkembangan tingkat partisipasi sekolah haruslah diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai,

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. SDN Bulusari

SDN Bulusari merupakan sekolah dasar yang berada di kabupaten Kediri, tepatnya terletak di desa Bulusari kecamatan Tarokan jalan raya Tarokan no 54. Jumlah siswa pada tahun 2011/2012 sebanyak 72 siswa dan 2012/2013 sebanyak 81 siswa dengan kategori keseluruhan. Siswa terdiri dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam. Dilihat dari tingkat kesejahteraan orang tua siswa terdapat 50% orang tua siswa yang dikategorikan pra sejahtera, sisanya adalah menengah 35% dan kategori mampu 15%. Pada Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 500 m² serta terdiri dari berbagai ruangan dan terakreditasi baik. Sekolah memiliki 1 (satu) orang kepala sekolah, 9 (sembilan) orang guru PNS, dan 5 (lima) orang guru tidak tetap.

a. Visi, Misi dan Tujuan SDN Bulusari

Setiap Sekolah Dasar tentunya memiliki Visi, Misi dan Tujuan sendiri sendiri namun secara garis besar esensi dari yang dicapai semuanya adalah sama. Dan peneliti akan menjelaskan secara garis besar saja. Dimana keseluruhan dari kesimpulan tentang Visi, Misi dan Tujuan dari SDN Bulusari tersebut yakni,

1. Visi

“Menjadi SD yang berpancasila berprestasi terampil dalam kehidupan, beriman, dan bertakwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”.

2. Misi

- a. Menyusun kurikulum yang adaptif;
- b. Mengoptimalkan proses pembelajaran yang PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan);
- c. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan;
- d. Membudayakan pendidikan karakter bangsa dalam perilaku kehidupan sehari-hari;
- e. Mengupayakan manajemen sekolah yang kondusif;
- f. Mengupayakan pembiayaan pendidikan yang memadai;
- g. Melaksanakan penilaian secara obyektif dan memantau prestasi siswa secara berkesinambungan.

3. Tujuan Sekolah

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, berkarakter, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Merujuk pada tujuan pendidikan dasar tersebut, maka tujuan Sekolah Dasar Bulusari adalah sebagai berikut :

- a. Mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan serta pendidikan karakter bangsa;
- b. Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi;
- d. Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar;
- e. Menjadi sekolah favorit yang diminati masyarakat.

b. Prestasi Lulusan

- a. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 100% lulus,
- b. Prestasi lomba-lomba akademik sekolah (rata-rata belum mencapai prestasi),
- c. Prestasi non akademik sekolah yaitu dalam bidang olahraga dan keterampilan/seni, belum dapat dikatakan tinggi (rata-rata mencapai kejuaraan tingkat kecamatan).

c. Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

- a. Di seluruh SDN Bulusari terdapat 7 orang guru yang berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan hanya sebagian yang telah mengikuti penataran-penataran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, sisanya 3 orang berpendidikan belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang, semua guru belum memiliki prestasi baik di tingkat kotamadya kabupaten maupun propinsi.
- b. Kepala sekolah berpendidikan S1 dan mampu mengoperasikan komputer.
- c. Tenaga Kependidikan

Untuk tenaga kependidikan tidak memiliki tenaga administrasi sarana dan prasarana, selama ini kepala sekolah dengan bendahara yang memiliki peranan dominan sebagai tenaga administrasi sarana prasarana dalam mengelola pemanfaatan dana program tersebut.

d. Pengembangan Kurikulum

Kurikulum SDN Bulusari telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- a. 100% guru telah menyusun program tahunan, program semester (promes) dan silabus mata pelajaran, untuk kalender pendidikan sekolah hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 100% guru telah menyusun RPP
- c. Program remedial dan pengayaan. Guru telah melaksanakan remedial dan melakukan pengayaan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan.

e.Sarana dan Prasarana

- a. Setiap sekolah ini memiliki berbagai ruangan kelas yang lumayan nyaman, karena ruang kelas yang tersedia mampu menampung seluruh siswa, maka proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lumayan baik. Walaupun sarana dan prasarana (fasilitas) lainnya belum lengkap dan memadai, belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan,
- b. Bahan dan sumber belajar
 - Buku, beragam macamnya, buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain-lain dalam kondisi sebahagian tidak terawat.
 - Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- c. Materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dengan menggunakan fasilitas yang cukup modern seperti papan tulis (*white & black board*), alat bantuan peraga IPA, serta LCD dalam jumlah yang belum proporsional dengan jumlah siswa.
- d. Fasilitas ruangan yang disediakan untuk menunjang pembelajaran para siswa di sekolah ini antara lain tersedianya ruang perpustakaan, koperasi,

dan mushola serta fasilitas lainnya adalah lapangan untuk berolahraga dan beberapa sarana penunjang kebersihan.

- e. Semua lingkungan sekolah tertib dan aman, meskipun secara keseluruhan infrastruktur bangunan dari tiap tiap sekolah belum diperbaiki (dalam tahap renovasi). Semuan Sekolah ini juga belum memiliki jaringan komunikasi akademik (website).

f. Pengembangan Nilai

- Memenuhi standar penilaian sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan (KKM (kriteria ketuntasan minimal) belum memenuhi SNP),
- Sistem penilaian tersusun dengan baik,
- Belum memiliki bank soal sebagai database sistem penilaian yang baik,
- Memiliki dokumen penilaian yang lengkap, komprehensif dan rapi.

3. Tinjauan Mengenai Kebijakan BOS

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD mencapai 98,2% pada tahun 2010. Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SD yang harus ditampung oleh pendidikan menengah. Pusat Data dan Statistik Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud tahun 2011 menyatakan

bahwa dari 4,2 juta lulusan SD, hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sisanya sebesar 1,1 juta siswa tidak melanjutkan. Sementara pada waktu yang bersamaan sekitar 159.805 siswa SD mengalami putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan karena alasan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang rintisannya dimulai pada tahun 2012. Salah satu tujuan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. Untuk mencapai tujuan Program Wajib Belajar 12 tahun tersebut, pemerintah telah menyusun program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (RBOS SD). Pada tahun 2012, telah disiapkan anggaran sebesar 948 milyar rupiah yang akan disalurkan kepada SMP & MTS Negeri dan Swasta diseluruh Indonesia. Tujuan digulirkannya program Rintisan BOS SD ini adalah secara bertahap membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam rangka Rintisan Wajib Belajar 12 tahun.

Untuk menyamakan persepsi dan kesamaan pemahaman BOS secara singkat kita uraikan terlebih dahulu mengenai definisi Biaya Pendidikan dan terminologi program BOS. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional. BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumberdaya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih

dari satu tahun, seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil. Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM) , Guru tidak tetap (GTT), Pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur) dan pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain lain. Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervise. Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya operasional yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, rekreasi dan sebagainya. Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup dua komponen yaitu biaya operasional dan biaya non personil, oleh karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah, pemerintah daerah dan selanjutnya dari partisipasi masyarakat yang mampu.

- Dasar hukum pemberian Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOS SD) kepada sekolah meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Peraturan Mendiknas no 36 Tahun 2010 Mengenai Standar Sarana Dan Prasarana SD / SMP.
6. Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS
Tahun Anggaran 2012

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan BOS

Pemberian BOS Sekolah Dasar (SD) adalah merupakan amanah dan kepercayaan, sehingga penting bagi kita secara bersama-sama menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, kembali dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 ialah bahwasannya *dilarang* melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Mengalokasikan dana Rintisan BOS SM yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya,
5. Menanamkan saham;
6. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program Rintisan BOS SM/perpajakan program Rintisan BOS SM yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Apabila berdasarkan dari hasil evaluasi institusi pemeriksa (Inspektorat Jenderal/BPK/ Bawasda), penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan/kesalahan/kesengajaan dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara, Dinas Pendidikan Propinsi memberi peringatan/teguran secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian.
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
3. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota, atau sekolah, bilamana terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.
4. Sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana Rintisan BOS SD masuk dalam daftar hitam (*black list*) sekolah yang tidak akan mendapat bantuan dari Direktorat Pembinaan SD & SLDB
5. Menyampaikan penyalahgunaan dana tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk menegur sekolah



- Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar, untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala pungutan/gratis. Namun demikian masyarakat dan orangtua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengembangan sekolah.
3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih professional, transparan, mandiri, kerjasama, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Proses evaluasi BOS

Instruksi evaluasi sendiri telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 51 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan BOS yang di dadalamnya meliputi evaluasi melalui tahapan pemantauan dan supervisi. Pemantauan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program BOS SD (Sekolah Dasar) apakah pada proses pelaksanaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan BOS SD

atau belum. Sedangkan supervisi ditujukan untuk mengetahui sampai dimanakah atau seberapa besarkah manfaat beserta cakupan dari program BOS SD (Sekolah Dasar) sendiri bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah atau hambatan hambatan yang dialami serta mencari solusi beserta pemecahan masalah sekaligus. Hasil pemantauan dan supervisi selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan perumusan perencanaan program BOS SD (Sekolah Dasar) di masa yang akan datang atau selanjutnya. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi dilakukan secara internal oleh bagian komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah dan eksternal oleh Direktorat Pembinaan SD serta dinas pendidikan di tingkat propinsi.

a. Supervisi pemantauan pelaksanaan program BOS

1. Pemantauan Internal

- Tingkat Sekolah melalui Komite Sekolah

Pada Pemantauan di tingkat ini adalah Komite Sekolah. Komite sekolah selaku partner atau owner kerjasama dengan pihak sekolah melakukan pemantauan beserta pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan di sekolahnya secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada sekolah dalam proses penyusunan laporan pertengahan dan laporan akhir program/kegiatan sekolah serta untuk bahan konsultasi ketika ada pemantauan dari instansi lain yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, atau Direktorat Pembinaan SD.

- **Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Pengawas Sekolah**

Pada evaluasi ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disini berfungsi melaksanakan pemantauan langsung sebagai bagian tugas dari rutinitas pembinaan terhadap sekolah. Dengan demikian pemantauan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota mencakup seluruh aspek kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan program BOS SD (Sekolah Dasar).

2. Pemantauan Eksternal

Untuk pemantauan eksternal disini meliputi pemantauan yang melibatkan :

a. Pendidikan Pusat

Direktorat Pembinaan SD disini melaksanakan pemantauan ke pengelola program di dinas pendidikan propinsi dalam rangka memantau pelaksanaan program BOS SD, untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai, dan mencatat masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan dari program BOS SD.

b. Dinas Pendidikan Propinsi

Dinas Pendidikan Propinsi disini melalui peranannya berfungsi untuk melakukan pemantauan langsung terhadap sekolah berdasarkan pada sampel atau contoh dari fakta yang sudah terdata untuk kemudian memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan atau ketercapaian dari program program di SD (Sekolah Dasar).

3. Waktu Pelaksanaan Pemantauan

a. Evaluasi ini dilakukan dengan Pemantauan internal oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota terhadap sekolah masing masing

serta dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan berlangsung. Dengan demikian diharapkan kepala sekolah menyadari dan mengetahui betul bagaimana perkembangan pelaksanaan program yang sedang berjalan dan sedini mungkin mengetahui kendala yang muncul sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada.

- b. Evaluasi ini dilakukan dengan Pemantauan oleh dinas pendidikan propinsi dan dilaksanakan pada saat program kegiatan sedang berlangsung sehingga pada akhir kegiatan agar dapat mengetahui proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut
- c. Evaluasi ini dilakukan dengan Pemantauan oleh Direktorat Pembinaan SD atau instansi lain dari Pusat serta dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan.

- Aspek-aspek dalam evaluasi pemantauan:

- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan yang ditentukan berdasarkan sesuai dengan jumlah siswa.
- b. Kriteria siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya;
- c. Data siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya;
- d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan monitoring.

- Pengawasan Program Rintisan BOS SD (Sekolah Dasar).

Untuk Pengawasan terhadap pelaksanaan program Rintisan BOS SD (Sekolah Dasar) dilakukan oleh lembaga-lembaga yang meliputi:



1. Pengawasan internal dilakukan oleh komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah.
2. Tim monitoring independen yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
3. Instansi pengawas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Nasional, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Propinsi dan Kabupaten/ Kota

B. Administrasi pelaksanaan Program BOS di sekolah

Aspek administrasi pelaksanaan disini meliputi aturan regulasi atau system di dalam berjalannya implementasi program subsidi BOS pada sekolah dasar pada khususnya. Tata cara pelaksanaan program BOS di tahun tahun sebelumnya menurut serta berdasarkan pada wawancara dengan kepala sekolah SDN Bulusari, seluruh Bendahara SDN Bulusari , dan komite sekolah SDN Bulusari. yakni dimana hal hal yang meliputi pengelolaan dilakukan oleh tim pelaksana BOS, anggota pelaksana anggaran sekolah bersamaan bendahara dengan komando dari kepala sekolah untuk kemudian dalam proses pelaksanaannya diawasi serta berpartner dengan pihak komite sekolah sebagai selaku wakil dari wali murid yang memberikan pengawasan kontrol sehingga pada proses pelaksanaann BOS tercipta sebuah transparansi dan akuntabilitas.

- aspek masukan (input)

1. Jumlah anggaran

Untuk kesesuaian jumlah anggaran yang digunakan pada BOS, jumlah anggaran menyesuaikan dengan jumlah kuota siswa yang ada di SDN

Bulusari. Berikut jumlah realisasi anggaran yang diterima oleh sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Realisasi dan Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) SDN Bulusari

NO	Tahun	BOS	APBD	Komite	Jumlah
1.	2010	27.085.000	5.350.000	750.000	33.185,000
2.	2011	20.025.000	3.050.000	950.000	24.025.000
3	2012	23.750.000	4.325.000	800.000	28.875.000

Sumber : laporan APBS seluruh SDN Bulusari

2 Jumlah siswa di sekolah

Untuk jumlah siswa pada tahun 2012 kemarin hingga 2013 ialah sebagai berikut :

Tabel .3.
Jumlah Siswa SDN Bulusari 3 Tahun Terakhir.

No.	Tahun	Jumlah siswa
1.	2010	85
2.	2011	72
3.	2012	81

	Jumlah	238
--	--------	-----

Sumber : Data rekap jumlah seluruh siswa SDN Bulusari Kabupaten Kediri.

3. SDM pelaksana program BOS di sekolah

Untuk SDM pelaksanaan disini melibatkan yakni, Kepala sekolah SDN Bulusari, Bendahara SDN Bulusari, dan Komite Sekolah SDN Bulusari. Sesi wawancara yang Pertama menjelaskan, bahwa dari segi pencapaian masukan berkaitan dengan sumber daya manusia yang menangani langsung, walaupun tidak ada persyaratan khusus yang berkaitan dengan petugas menangani program BOS, tetapi dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) beberapa faktor kualifikasi seperti latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensi perlu diperhatikan. Petikan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Bulusari Tarokan bapak Mudhofir, SPD. nmengungkapkan sebagai berikut:

“untuk SDM pelaksana pengelola dalam penyelenggaraan program BOS disini meliputi Kepala sekolah, Bendahara sekolah, Dewan guru, dan Komite sekolah (hasil wawancara tanggal (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2013)

“untuk armada bendahara sekolah yang mengelola dan menangani dana BOS alhamdulillah cukup kompeten dengan bidangnya dan sudah berpengalaman dalam mengelola biaya pendidikan di sekolah selama kurang lebih selama 2 tahun”. (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2013)

- Aspek proses (Proses)

Untuk proses evaluasi pengelolaan atau penyelenggraan BOS berdasarkan penuturan Kepala sekolah SDN Bulusari Tarokan Bpk

Mudhofir, SPD sebagai sampel wawancara dan selaku penanggung jawab program BOS di sekolahnya memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

“Untuk proses evaluasi pengelolaan atau penyelenggaraan BOS kami selalu melihat dan berpandangan pada tolak ukur proses pengelolaan atau penyelenggaraan BOS di tahun tahun sebelumnya dimana melakukan pengkajian penilaian dari setiap pengawasan berdasarkan indikator indikator tingkatan pencapaian oleh sekolah terhadap program BOS yang sudah dilaksanakan kemudian berdasarkan penilaian kami melakukan pengukuran dengan membandingkan indeks pencapaian pelaksanaan terdahulu untuk mengetahui sampai dimana dan sejauh manakah keberhasilan efektifitas dari pneranan evaluasi terhadap keberhasilan suatu program apakah berjalan sesuai perencanaan atau belum” hasil wawancara tanggal 14 Maret 2013)

“Keberadaan evaluasi BOS sebagai penunjang dalam keterbaikan proses terselenggarakannya suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah sangatlah dominan peranannya, kontribusi BOS sebagai biaya pendidikan sudah cukup mewakili dan mengcover dari pengeluaran anggaran sekolah selain dari APBD.” (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2013)

Selain itu, Bendahara sekolah. Dra, Naniek dari juga memaparkan bahwa :

“Mekanisme penyaluran dana BOS masuk melalui rekening sekolah per bulan, dimana sistem dan prosedurnya, terlebih dahulu kami harus membuat surat perjanjian dan surat pernyataan, kemudian membuat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), membuat daftar usul alokasi anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), dan setelah dana cair/keluar maka pihak sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban BOS per triwulan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.” (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2013)

C.Indikator pencapaian evaluasi program BOS

- Indikator pencapaian kualitas mutu pendidikan

Dari segi pencapaian hasil, adanya evaluasi pada pemanfaatan dana BOS di sekolah yang mengacu mutu pendidikan sangat dirasakan oleh orang tua siswa.

Secara umum mutu diartikan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Dalam

konteks pendidikan pengertian mutu, dapat dipandang dari segi proses pendidikan dan hasil pendidikan. (Depdiknas, 2007). Ditinjau dari sisi proses, pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari segi *input*, seperti fasilitas/bahan mengajar, kemampuan guru mengajar, sarana prasarana sekolah dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Untuk mencapai hasil pendidikan tersebut, sekolah dituntut mampu mensinkronkan berbagai input/komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ujian nasional). Demikian pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di bidang olah raga, seni atau keterampilan lainnya.

Angka kelulusan di SDN Bulusari Tarokan relatif baik, terhitung sejak adanya evaluasi pelaksanaan program BOS, seluruh siswa dinyatakan lulus (100%) dan seluruhnya melanjutkan ke jenjang SMP. Kemampuan siswa terhitung masih dalam kategori cukup, dalam arti tidak ada nilai ujian siswa yang terlalu menonjol

Penuturan dari Bpk, Mudhofir, SPD selaku Kepala Sekolah dari SDN Bulusari 3 Tarokan menyatakan bahwa :

“Dari tahun ke tahun nilai ujian di SD ini meningkat selama adanya dana BOS. paling signifikan pada tahun ajaran 2010/2011 dan 2011/2012, dengan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks ke depan kami akan terus berusaha untuk mengupayakan peningkatan terhadap mutu pendidikan di sekolah ini”.(Hasil wawancara 14 maret 2013)

Hal lain yang sangat penting dalam pencapaian hasil adalah soal keringanan biaya sekolah, apakah dengan adanya evaluasi pada program dana BOS, orang tua siswa kadang kadang masih dibebankan pungutan/iuran lain.

Orang tua siswa SDN Bulusari Tarokan memberi keterangan sebagai berikut :

“Kalau untuk biaya sekolah terutama iuran, kami memang tidak dipungut, tetapi terkadang untuk biaya tidak terduga dari pihak sekolah yang masih memungut dari kami yang sebelumnya sudah disosialisasikan bersama dengan para wali murid oleh komite sekolah. Untuk menyelesaikan masalah kesalahfahaman pada penggunaan dana BOS Kepala sekolah telah mengadakan sosialisasi bersama yang diadakan disetiap pengambilan rapor semester dimana pada kegiatan tersebut menemukan komitmen bersama memperbaiki pelaksanaan BOS di sekolah,(14 Maret 2013)



“Dengan adanya dana bos pungutan di sekolah hampir tidak ada, paling hanya kalau anak-anak mengadakan perpindahan sekolah, biasanya dipungut biaya, itupun tidak banyak dan saya berharap bahwa yang mendapatkan dana BOS tersebut harus benar-benar orang yang tidak mampu/layak mendapat dana BOS” (15 maret 2013)

- Indikator pada peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap sarana dan prasarana di sekolah

Untuk masalah sarana prasarana pendidikan pada dasarnya cukup kompleks, namun demikian dapat ditelusuri dari berbagai sisi, yaitu dari segi jenis, proses, dan pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program telah memadai, seperti yang dituturkan oleh Bpk Mudhofir, SPD selaku Kepala Sekolah SDN Bulusari 3 Tarokan Kabupaten Kediri menuturkan.

“Untuk kelengkapan program kami disini memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, LCD, ruang guru, yang dapat digunakan. Selain itu permasalahan yang kami hadapi masih kurangnya guru yang ahli dibidang TI di sekolah ini.” (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2013)

Ibu Dra Naniek selaku bendahara juga memaparkan bahwa:

“Masalah sarana dan prasarana dalam pembelajaran siswa sudah cukup memadai, masih banyak fasilitas yang kurang, terlebih lagi masalah infrastruktur bangunan yang digunakan siswa masih dalam tahap pengajuan. agar bangunan yang lama mendapat biaya renovasi dari pemerintah. Kami terus mengusahakan untuk melengkapinya, dan masalah masih dikenakan atau tidaknya pembiayaan pendidikan, kami pihak sekolah tidak memungut biaya dari orang tua siswa”. (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2013)

“Jumlah penggunaan buku belum sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada setiap semester baru (penerimaan siswa baru), karena sulit untuk mengklasifikasinya, tetapi sekolah terus

mengupayakan kekurangan tersebut karena banyak anggaran lain yang dikeluarkan oleh sekolah” (hasil wawancara 15 Maret 2013)

Selain itu, mengenai sarana dan prasarana yang mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terlihat sekolah sedapat mungkin memanfaatkan untuk perawatan sarana dan prasarana yang telah ada, pembelian buku, dan sarana prasarana sekolah lainnya. Berikut petikan wawancara dengan salah satu orangtua siswa SDN Bulusari Tarokan berkaitan dengan pemanfaatan BOS bagi sarana prasarana sekolah.

Bpk Mudhofir, SPD selaku , Kepala Sekolah SDN Bulusari Tarokan, juga menyampaikan pendapatnya.

“Adanya Evaluasi pada pelaksanaan BOS sangat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah, pengeluaran sekolah yang berasal dari dana BOS untuk guru honorer saja mengambil 30% dari dana BOS, belum lagi dilakukannya perawatan sekolah dsb, apalagi sekolah menyediakan buku untuk siswa. Selebihnya fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar sudah efektif dan memadai, dari peralatan penunjangnya (fasilitas di sekolah ini)”.

- Indikator pada peningkatan layanan pendidikan siswa

Sedangkan dampak yang dirasakan oleh sekolah dengan adanya evaluasi pelaksanaan program BOS antara lain, adanya peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas dari sarana pelayanan pendidikan dan hal ini akan dapat dirasakan pada meningkatnya kualitas proses belajar mengajar siswa, dampak yang dirasakan oleh siswa adalah adanya beban biaya sekolah yang menjadi lebih berkurang, seperti diseluruh SDN Bulusari Kecamatan Tarokan secara umum untuk biaya SPP tiap untuk siswa gratis.

Sedangkan dampak lain dengan adanya evaluasi pelaksanaan program BOS, alokasi sekolah untuk bantuan khusus bagi siswa miskin atau tidak mampu

cukup besar yakni berkisar rata-rata 15 % - 20 % dari jumlah siswa keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dari sekolah yang menjadi sampel dan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Bulusari yang menyatakan bahwa mulai tahun ajaran 2012 / 2013 Sekolah mengalokasikan bantuan khusus bagi siswa tidak/kurang mampu berkisar 20% dari jumlah siswa sebanyak 238 anak yaitu sebanyak 37 anak tidak/kurang mampu yang diberikan dalam bentuk bea siswa bebas dari segala biaya sekolah (gratis, kecuali biaya tour/wisata siswa.). Dari jumlah tersebut tiap tahun akan mengalami kenaikan hal ini dapat terealisasi karena adanya program BOS disisi lain sekolah menerapkan manajemen Subsidi silang bagi orang tua murid yang mampu untuk membantu mengangkat bagi siswa kurang mampu/miskin. Dengan demikian diharapkan program BOS akan benar-benar dapat memberikan akses yang luas bagi keluarga kurang tidak mampu sehingga dapat menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun secara berkualitas.

- Indikator pada masalah persepsi pemahaman wali murid mengenai BOS

Adanya evaluasi pada program BOS menciptakan sebuah sosialisasi yang rutin dimana keberadaan tersebut dapat memperbaiki masalah persepsi pemahaman wali murid mengenai BOS yang sebelumnya kurang jelas pengertian pemanfaatannya. Efektifitas evaluasi disini melihat dari dua sudut pandang dimensi yakni, manfaat dan partisipatif. Pada dimensi manfaat dapat disimpulkan bahwa peranan BOS sangat efektif membantu keuangan sekolah. Adanya evaluasi program BOS di sekolah pada setiap tahun ajaran menciptakan suatu tekad yang bagus dari pihak pengelola program BOS dan peran aktif pihak terkait beserta para wali murid mengenai perbaikan pelaksanaan program BOS

di sekolah. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan bapak Mudhofir, SPD sebagai berikut :

“Keberadaan evaluasi pada program BOS di tiga tahun terakhir ini lebih berfokus pada dua dimensi, yakni manfaat dan partisipatif serta perbaikan pada masalah pemahaman persepsi wali murid mengenai peranan dari BOS yang sesungguhnya dimana BOS bukanlah hanya sebagai subsidi khusus namun subsidi umum yang dipergunakan untuk mengkover semua kegiatan belajar mengajar di sekolah”(Hasil wawancara 15 Maret 2013)

Diadakannya evaluasi pada program BOS memperbaiki masalah pemahaman persepsi wali murid mengenai peranan dari program BOS yang sesungguhnya dimana BOS bukanlah hanya sebagai subsidi khusus namun subsidi umum yang dipergunakan untuk mengkover semua kegiatan belajar mengajar di sekolah. (Hasil wawancara 15 Maret 2013)

Perbaikan masalah transparansi yang semakin jelas kepada wali murid mengenai pelaksanaan proses pemanfaatan BOS di sekolah, diberlakukannya evaluasi pada pelaksanaan BOS lebih memperbaiki pada fungsi kontrol atau penerapan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan program BOS di sekolah tersebut apakah berjalan sesuai prosedur juklak juknis atau belum. (Hasil wawancara 15 Maret 2013)

5 Faktor faktor penghambat dan pendukung evaluasi implementasi pemanfaatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan SDN Bulusari Tarokan di Kabupaten Kediri

Berbagai kendala menjadi penyebab penghambat dan pendukung dari diberlakukannya evaluasi implementasi pemanfaatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi pendidikan SDN Bulusari Tarokan di Kabupaten Kediri yang ditemui informan dalam program BOS ini adalah ialah sebagai berikut :

- a. Masalah hambatan yang dihadapi oleh sekolah lebih ke Laporan pertanggung jawaban dana BOS sudah ditentukan waktunya oleh dinas pendidikan. Berikut petikan wawancara dengan bapak Mudhofir, SPd, selaku sampel wawancara dari SDN Bulusari 3 sebagai berikut :
“Penyelesaian pada laporan pertanggung jawaban dana BOS yang sudah ditentukan waktunya oleh dinas pendidikan membuat kami selaku pengelola penyelenggara BOS yang meliputi kepala sekolah dan bendahara harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan laporan tersebut di tiap bulannya”
hasil wawancara tanggal 14 Maret 2013 pukul 09.27 WIB)
- b. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat, apalagi kami sempat berpikir untuk mengadakan sosialisasi BOS, tapi kembali lagi promosi awal mengenai program BOS yang diberikan pemerintah kepada masyarakat cenderung menyebabkan kesalahfahaman bahwa BOS dianggap sebagai bantuan khusus bagi siswa miskin dan hanya dipruntukan kepada siswa miskin saja.
- c. Masih belum optimalnya pengelolaan BOS oleh pihak sekolah karena keberadaan dana BOS ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk keperluan sekolah yang utama yakni, membiayai dan memfilitasi pendidikan siswa
- d. Masih adanya anggapan dan pemahaman dari para orang tua wali murid bahwa Program BOS adalah bantuan khusus untuk siswa miskin padahal BOS sendiri adalah bukan sekedar bantuan khusus namun mencakup untuk biaya operasional keseluruhan bagi semua pelayanan pendidikan siswa di sekolah

Banyak pihak yang menilai bahwa masalah ada beberapa wali murid yang tidak melihat secara langsung mengenai informasi transparansi penggunaan dana dan juga ada sebahagian wali murid tidak pernah menanyakan perihal pemanfaatannya dana BOS pada sekolah, karena yang menjadi masalah yang signifikan ialah yaitu masih kurangnya sosialisasi dilakukan oleh pihak sekolah sedangkan dalam pelaporan dan monitoring evaluasi, permasalahan yang dikemukakan adalah kesulitan sekolah dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam pelaksanaannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu berjalan dengan mudah. Sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer keberadaannya, program BOS harusnya mendapat berbagai respon positif, dari berbagai pihak dan dari berbagai sudut pandang. Seperti halnya program pemerintah lain, ternyata program BOS sendiri menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan. Sejak diluncurkan tahun 2005, program bantuan operasional sekolah (BOS). Banyak pihak (masyarakat) yang salah paham, mengira bahwa BOS merupakan beasiswa, padahal bukan. Dana BOS tidak diberikan kepada siswa, melainkan kepada sekolah, meskipun memang dihitung berdasarkan jumlah siswa. Salah satunya permasalahannya yaitu minimnya sosialisasi kepada orang tua yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Dikatakan minim karena sekolah yang diteliti mengakui mereka hanya melakukan sosialisasi hanya kepada komite sekolah, adapaun sosialisasi tersebut diadakan oleh dinas pendidikan bukan sekolah. Sekali lagi hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki sekolah untuk mengadakan sosialisasi.

Diantara berbagai tahapan pelaksanaan program dana BOS, secara umum menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan tahapan pelaksanaan yang dianggap paling tidak memuaskan, berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian menilai bahwa sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dan kelancaran tahapan-tahapan berikutnya. Karena sosialisasi dalam program ini dilakukan secara berjenjang, hasil ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya kekurangan dalam mekanisme penyampaian materi/komunikasi tingkat pusat ke provinsi, tingkat provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke pelaksana program di tingkat sekolah serta

pemahaman kepada orang tua siswa. Dengan keterbatasan dana, waktu, dan sosialisasi yang telah dilaksanakan juga dianggap sebagai akar masalah di berbagai tahapan pelaksanaan lainnya, termasuk dalam pemanfaatan dana, pelaporan dan monitoring.

Dana BOS yang diturunkan setiap satu bulan sekali. Hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan program dana BOS adalah adanya pengawasan dari pemerintah dalam bentuk monitoring evaluasi. Monitoring dilakukan sebagai bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan dana BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Tetapi hambatan di lokasi penelitian monitoring dan evaluasi dilakukan tidak secara berkala dan minimnya jumlah petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi tersebut mempengaruhi pada tingkat kesempurnaan pengelolaan dan penyelenggaraan implementasi program BOS di sekolah.

D. Pembahasan dan Analisis

1. Analisis Hasil Penelitian Mengenai Proses Evaluasi

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program BOS SD (Sekolah Dasar), Instruksi evaluasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 51 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Petunjuk teknis pengelolaan BOS yang di dadalamnya meliputi evaluasi melalui tahapan pemantauan dan supervisi Pemantauan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS SD (Sekolah Dasar) apakah pada proses pelaksanaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan BOS SD atau belum. Sedangkan supervisi ditujukan untuk mengetahui sampai dimanakah atau seberapa besarkah manfaat beserta cakupan dari Rintisan program BOS SD (Sekolah Dasar) sendiri bagi sekolah, mengidentifikasi

berbagai macam masalah atau hambatan hambatan yang dialami serta mencari solusi beserta pemecahan masalah sekaligus. Hasil pemantauan dan supervisi selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan perumusan perencanaan program BOS SD (Sekolah Dasar) di masa yang akan datang atau selanjutnya. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi dilakukan secara internal oleh bagian komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah dan eksternal oleh Direktorat Pembinaan SD serta dinas pendidikan di tingkat propinsi.

a. Supervisi pemantauan pelaksanaan program BOS

1. Pemantauan Internal

- Tingkat Sekolah melalui Komite Sekolah

Pada proses evaluasi ini meliputi pemantauan dan pengawasan di tingkat Komite Sekolah. Komite sekolah selaku partner atau owner kerjasama dengan pihak sekolah melakukan pemantauan beserta pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan di tiap tiap sekolah secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Kemudian dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada sekolah dalam proses penyusunan laporan pertengahan dan laporan akhir program/kegiatan sekolah serta untuk bahan konsultasi ketika ada pemantauan dari instansi yang membawahi serta menaungi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, atau Direktorat Pembinaan SD (Sekolah Dasar) hal tersebut sesuai dengan pernyataan Siagian (2008:112) yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan efektif.

- **Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Pengawas Sekolah**

Pada proses evaluasi ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disini berfungsi melaksanakan pemantauan langsung sebagai bagian tugas dari rutinitas pembinaan terhadap tiap tiap sekolah yang melaksanakan program programnya. Dengan demikian pemantauan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota mencakup seluruh aspek kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan program Rintisan BOS SD (Sekolah Dasar).

2. Pemantauan Eksternal

Pada proses pemantauan pengawasan ini direktorat Pembinaan SD (Sekolah Dasar) disini melaksanakan pemantauan ke pengelola program di dinas pendidikan propinsi dalam rangka memantau pelaksanaan program Rintisan BOS SD, untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai, dan mencatat masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan dari program Rintisan BOS SD (Sekolah Dasar). Dinas Pendidikan Propinsi disini melalui peranannya berfungsi untuk melakukan pemantauan langsung terhadap sekolah berdasarkan pada sampel atau contoh dari fakta yang sudah terdata untuk kemudian memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan beserta ketercapaian dari program program di SD (Sekolah Dasar) Bahwa kegiatan evaluasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya (Arikunto,2007:1).

Dengan melihat proses pemnataun secara internal dan eksternal diatas tentunya proses evaluasi selalu melihat pada kontekstual struktur

hearakis dimana setiap pemantauan dan pengawasan mengerucut dari berbagai tingkatan yakni dari pengawasan tingkat sekolah oleh komite sekolah kemudian dari tingkat dinas pendidikan melalui pengawas atau penilik sekolah. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu adanya evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja suatu program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat dalam (Arikunto dan Jabar 2004:3), bahwa evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek tersebut.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program BOS di sekolah

Evaluasi program BOS di sekolah bukanlah merupakan kegiatan akhir. artinya, kegiatan evaluasi ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan atau lebih tepat bila dikatakan siklus berkelanjutan sebab tidak berhenti sampai terkumpulnya data atau informasi, tetapi data atau informasi itu digunakan sebagai dasar kebijakan atau keputusan dalam pengembangan program BOS selanjutnya. Karena itu kegiatan evaluasi program BOS selalu memperhatikan prosedur dan langkah-langkah serta metoda atau strategi yang harus digunakan. Tahapan prosedur evaluasi, yaitu meliputi serangkaian kegiatan yang berurut sebagai berikut:

a. Identifikasi Tujuan yang akan Dicapai

Melakukan identifikasi terhadap tujuan yang ingin dicapai sangat penting karena memberikan arah pekerjaan yang akan dilaksanakan. Artinya selama melakukan evaluasi tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Langkah

awal kegiatan evaluasi adalah menetapkan parameter atau batasan-batasan yang akan dievaluasi, dapat dipusatkan pada program BOS secara keseluruhan atau pada tujuan khusus secara terpisah-pisah. Tujuan itu hendaknya jelas, singkat, operasional dan dapat diukur tingkat efektifitasnya.

b. Pengembangan rencana evaluasi:

Pengembangan rencana evaluasi merupakan langkah lanjutan setelah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Komponen-komponen rencana evaluasi program BOS yang perlu dikembangkan antara lain:

1. Data atau informasi yang dibutuhkan.
2. Alat pengumpulan data yang digunakan.
3. Sumber data atau informasi yang dapat dihubungi.
4. Personel pelaksanaan.
5. Waktu pelaksanaan.
6. Kriteria penilaian.
7. Bagaimana pelaporan dan pada siapa laporan itu disampaikan.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah rencana itu disusun dan disetujui, pelaksanaan evaluasi program BOS bergantung pada cara/metoda yang digunakan. Prinsip pelaksanaan evaluasi perlu memperhatikan faktor-faktor yang telah direncanakan sehingga terjadi berinteraksi antara faktor yang satu dengan lainnya dan dapat membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Pelaporan dan pemanfaatan hasil evaluasi dianggap sangat penting sebab langkah ini merupakan bentuk konkrit sikap akuntabilitas atas program dan hasil kegiatan yang telah dilakukan seorang konselor beserta staf yang lainnya. Hasil

kegiatan evaluasi yang baik adalah yang dapat memberikan sumbangan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan keputusan selanjutnya. Program BOS itu diganti, berlanjut atau dikembangkan semata-mata berdasarkan hasil evaluasi dengan melinat pada tolok ukur efisiensi dan indikator terdahulu.

Sesuai dengan wawancara dipenyajian data berdasarkan penuturan Kepala sekolah SDN Bulusari Tarokan Bpk Mudhofir, SPD yang memaparkan pendapatnya sebagai proses evaluasi pengelolaan atau penyelenggraan BOS kami selalu melihat dan berpandangan pada tolak ukur proses pengelolaan atau penyelenggraan BOS di tahun tahun sebelumnya dimana melakukan pengkajian penilaian dari setiap pengawasan berdasarkan indikator indikator tingkatan pencapaian oleh sekolah terhadap program BOS yang sudah dilaksanakan kemudian berdasarkan penilaian kami melakukan pengukuran dengan membandingkan indeks pencapaian pelaksanaan terdahulu untuk mengetahui sampai dimana dan sejauh manakah keberhasilan efektifitas dari pernakan evaluasi terhadap keberhasilan suatu program apakah berjalan sesuai perencanaan atau belum. Pernyataan diatas sesuai dengan (Griffin dalam Tilaar & Nugroho, 2008:69.) yang menyatakan Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. evaluasi selalu didahului dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Evaluasi pada aspek mejerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu adanya evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat dalam (Arikunto dan Jabar 2004:3) bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Pernyataan ini sesuai dengan diberlakukannya restrukturisasi pada armada pengelola BOS yakni evaluasi pada kinerja bendahara, pengawasan komite dan supervisi oleh kepala sekolah pada proses penyelenggaraan pelaksanaan pemanfaatan program BOS di sekolah.

Evaluasi pemanfaatan BOS. Pada evaluasi pemanfaatan BOS disini meliputi penggunaan fungsi BOS sebagai biaya pendidikan di sekolah. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. (dalam Gaffar,2000:10) yang dimaksud pembiayaan pendidikan ini adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Kemudian (Sudjana, 2002:36) mengartikan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan guna terselenggaranya proses pendidikan yang diinginkan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pernyataan diatas sesuai dengan penuturan Kepala sekolah SDN Bulusari Tarokan Bpk Mudhofir SPD

yang memaparkan pendapatnya yakni keberadaan BOS sebagai penunjang dalam proses terselenggarakannya suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah sangatlah dominan peranannya maka dari itu kontribusi BOS sebagai biaya pendidikan sudah cukup mewakili dan mengcover dari pengeluaran anggaran sekolah selain dari APBD.

3..Efektifitas evaluasi BOS di sekolah

Secara umum, untuk mengukur penilaian efektifitas evaluasi kinerja program menurut (Keban, 2006:222) telah dikembangkan dua model pendekatan utama, yaitu pendekatan yang menilai dari proses dan pendekatan yang berorientasi pada hasil. Sementara itu tolok ukur dari kedua pendekatan diatas tersebut adalah tetap berlandaskan pada sejauh manakah efektifitas evaluasi terhadap pencapaian tujuan suatu keberhasilan program.berjalan. Dua dimensi yang menjadi ukuran disini ialah kontribusi manfaat dan partisipatif sumber daya pelaksana penyelenggara pengelolaan BOS. Apabila melihat dari aturan BOS proses penyelenggaraan program BOS tidak secara tegas ditentukan apakah BOS ini untuk subsidi umum atau subsidi khusus yang diarahkan untuk siswa miskin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya BOS cenderung diperlakukan sebagai subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dan semua murid menerima manfaat program BOS. Secara konseptual, sekolah memegang kunci dalam penentuan penggunaan BOS termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin. Berdasarkan ketentuan (panduan BOS) dana BOS di kelola oleh Kepala Sekolah, Guru/tenaga administrasi. Uang dikirim langsung ke

nomor rekening sekolah oleh BRI sebagai lembaga penyalur yang ditentukan Tim Manajemen Provinsi. Sekolah boleh menggunakan BOS tersebut dengan berbagai jenis kegiatan berdasarkan RAPBS yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah, RAPBS sebagai persyaratan untuk menerima BOS harus mendapat persetujuan Ketua Komite Sekolah. Namun, hasil kajian yang dilaksanakan oleh peneliti memperlihatkan betapa besar dominasi Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hal ini terjadi hampir seluruh sekolah. Guru dan orang tua wali murid harusnya selalu diajak dalam proses penyusunan RAPBS, sedangkan Komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah.

Hal yang demikian inilah yang dapat menjadikan fungsi kontrol dapat berjalan secara lebih efektif. Berdasarkan hasil kajian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS dari SDN Bulusari hampir sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan, membayar tenaga honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep, Belanja barang dan jasa, Kegiatan Belajar mengajar, Kegiatan Kesiswaan, Kegiatan Pemeliharaan. Dari komponen tersebut pos yang paling besar adalah (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%). untuk kegiatan belajar mengajar, (10%) kegiatan kesiswaan dan (15%) pemeliharaan gedung. Untuk mengetahui perincian pemanfaatan dana BOS oleh Sekolah disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel.4.
Pemanfaatan dana BOS oleh SDN Bulusari.
tahun 2012

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	8.662.500,-	Pembayaran tenaga Honore, GTT, PTT, dan tenaga Harlep
2.	Belanja Barang dan Jasa	7.218.750,-	ATK, Bayar listrik, telepon, dan ,Penggunaan dll.
3.	Kegiatan Belajar Mengajar	5.775.000,-	Membuat soal ujian, ujian semester,remedial
4.	Kegiatan Kesiswaan	2.887.500,-	Kegitan kesiswaan Ekstrakurikuler
5.	Pemeliharaan Gedung	4.331.250,-	Renovasi gedung, Perbaikan kamar mandi/wc, lab dll
	Jumlah	28.875.000,-	

Sumber : Rekap keseluruhan pemanfaatan laporan pertanggungjawab SDN Bulusari 2012.

Berdasarkan rekap tabel diatas, meskipun terdapat evaluasi ternyata pengelolaan dari data rekap tabel diatas memperlihatkan bahwa efektifitas pemanfaatan dana BOS oleh Sekolah Dasar Negeri Bulusari di Kabupaten Kediri sebagian besar anggaran dana BOS digunakan untuk

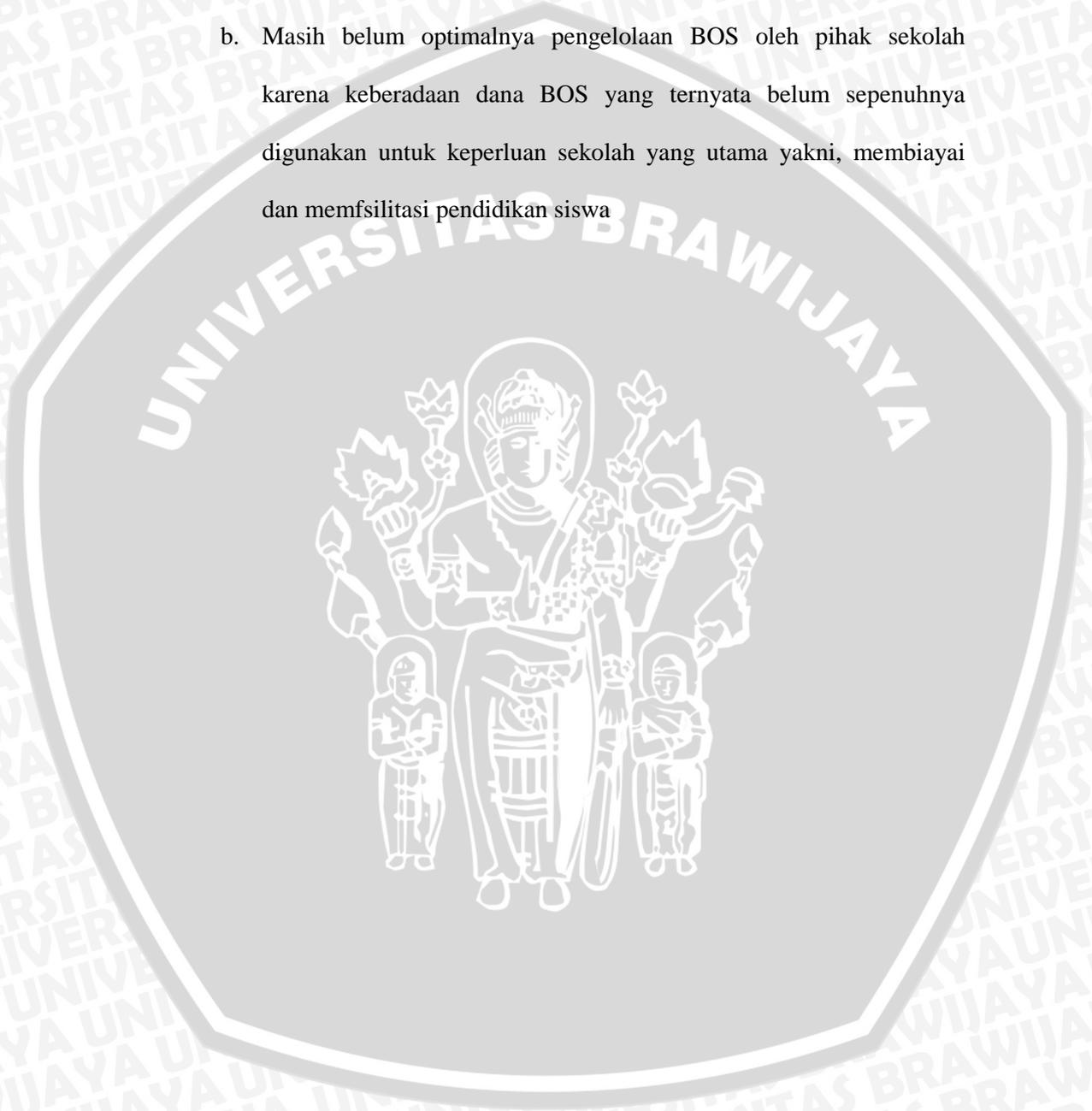
membayar tenaga honorer guru/GTT/PTT/Harlep, urutan kedua adalah untuk pembelian barang dan jasa sedangkan yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Pengelompokan dan pengklasifikasian hal ini sesuai dengan pernyataan (Nanang, 2004:78) yang menjelaskan bahwa berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, dan pendataan. Semua pembiayaan diarahkan untuk kelancaran tugas dan memaksimalkan fungsi peran sekolah.

2 Faktor faktor penghambat dan pendukung evaluasi implementasi pemanfaatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan SDN Bulusari

Dalam pelaksanaannya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu berjalan dengan mudah. Sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer keberadaannya, program BOS harusnya mendapat berbagai respon positif, dari berbagai pihak dan dari berbagai sudut pandang. Seperti halnya program pemerintah lain, ternyata program BOS sendiri menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan. Sejak diluncurkan tahun 2005, program bantuan operasional sekolah (BOS). Banyak pihak (masyarakat) yang salah paham, mengira bahwa BOS merupakan beasiswa, padahal bukan. Dana BOS tidak diberikan kepada siswa, melainkan kepada sekolah.

- **Faktor internal**

- a. Masalah hambatan yang dihadapi oleh sekolah lebih ke proses penyusunan Laporan pertanggung jawaban dana BOS yang selalu ditentukan waktu dateline laporan penyelesaiannya..
- b. Masih belum optimalnya pengelolaan BOS oleh pihak sekolah karena keberadaan dana BOS yang ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk keperluan sekolah yang utama yakni, membiayai dan memfsilitasi pendidikan siswa



- **Faktor eksternal**

- a. Masih adanya anggapan dan pemahaman dari para orang tua wali murid bahwa Program BOS adalah bantuan khusus untuk siswa miskin padahal BOS sendiri adalah bukan sekedar bantuan khusus namun mencakup untuk biaya operasional keseluruhan bagi semua pelayanan pendidikan siswa di sekolah

Diantara berbagai tahapan pelaksanaan program dana BOS, secara umum menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan tahapan pelaksanaan yang dianggap paling tidak memuaskan, berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian menilai bahwa sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dan kelancaran tahapan-tahapan berikutnya. Karena sosialisasi dalam program ini dilakukan secara berjenjang, hasil ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya kekurangan dalam mekanisme penyampaian materi/komunikasi tingkat pusat ke provinsi, tingkat provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke pelaksana program di tingkat sekolah serta pemahaman kepada orang tua siswa. Dengan keterbatasan dana, waktu, dan sosialisasi yang telah dilaksanakan juga dianggap sebagai akar masalah di berbagai tahapan pelaksanaan lainnya, termasuk dalam pemanfaatan dana, pelaporan dan monitoring.

BAB V

PENUTUP

V.I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya mengenai evaluasi implementasi program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses evaluasi pelaksanaan program BOS

Proses pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 51 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan BOS yang di dadalamnya meliputi evaluasi melalui tahapan pemantauan dan supervisi. Pemantauan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan yang mendalam terhadap pelaksanaan program BOS SD (Sekolah Dasar) apakah pada proses pelaksanaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan BOS SD atau belum. Sedangkan supervisi ditujukan untuk mengetahui sampai dimanakah atau seberapa besarkah manfaat beserta cakupan dari program BOS SD (Sekolah Dasar) sendiri bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah atau hambatan hambatan yang dialami serta mencari solusi pemecahan masalah sekaligus. Hasil pemantauan dan supervisi selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan perumusan perencanaan program BOS SD (Sekolah Dasar) di masa yang akan datang atau selanjutnya. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi dilakukan secara internal oleh bagian komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah

dan secara eksternal oleh Direktorat Pembinaan SD serta dinas pendidikan di tingkat propinsi.

a. Kemudian untuk proses supervisi pemantauan pelaksanaan program

BOS meliputi yakni:

- Pemantauan internal

Evaluasi ini melalui proses pemantauan dan pengawasan pada tingkat Sekolah melalui Komite Sekolah, kemudian pemantauan pada tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Pengawas Sekolah,

- Pemantauan eksternal

Evaluasi ini melalui proses pemantauan dan pengawasan pada Direktorat Pembinaan SD dengan melaksanakan pemantauan ke pengelola program di dinas pendidikan propinsi dalam rangka memantau pelaksanaan program Rintisan BOS SD, untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai, dan mencatat masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan dari program BOS SD. Dinas Pendidikan Propinsi disini melalui peranannya berfungsi untuk melakukan pemantauan langsung terhadap sekolah berdasarkan pada sampel atau contoh dari fakta yang sudah terdata untuk kemudian memastikan akuntabilitas keterlaksanaan capaian dari program program di SD (Sekolah Dasar).tersebut.

b. Evaluasi pelaksanaan Program BOS di sekolah

- aspek masukan (input)

Input utama dari pelaksanaan Program BOS di sekolah yang meliputi kesesuaian jumlah anggaran, kesesuaian jumlah siswa di sekolah, beserta pengawasan dalam proses SDM pelaksana program BOS di sekolah dimana meliputi supervisi kepala sekolah, peranan komite dan dewan guru, kontribusi bendahara dalam melaksanakan peranannya sebagai pengelola penyelenggara program BOS di sekolah menjadi elemen utama dalam sisi sisi yang akan diberlakukan evaluasi.

- Aspek proses (Proses)

Pada aspek ini meliputi evaluasi pada proses penyelenggaraan beserta pengelolaan anggaran BOS oleh pihak sekolah yang meliputi evaluasi menejerial, sosialisasi transparansi, mekanisme penyaluran dana, pemanfaatan dana disetiap jenis penggunaan kegiatan dengan bertolak ukur pada suatu pendekatan kinerja program yang menitikberatkan perspektif manfaat dan partisipatif dari pelaksana sasaran keberhasilan program yang dituju.

c. Efektifitas evaluasi BOS di sekolah

Efektifitas evaluasi pelaksanaan BOS di sekolah berpendekatan pada perspektif manfaat dan partisipatif. Peranan SDM dalam mengelola BOS apakah mencapai hasil yang diinginkan atau belum. Analisis dari pengelompokan pemanfaatan penggunaan Dana BOS menjadi indikator utama melihat fungsi kontrol peranan SDM dalam mengelola anggaran. Pada

dimensi manfaat dapat disimpulkan bahwa peranan BOS sangat efektif membantu keuangan sekolah. Adanya evaluasi program BOS di sekolah pada tiga tahun ajaran terakhir menciptakan suatu tekad yang bagus dari pihak pengelola program BOS dan peran aktif pihak terkait beserta para wali murid mengenai perbaikan pelaksanaan program BOS di sekolah. Transparansi yang semakin jelas kepada wali murid mengenai pelaksanaan proses pemanfaatan BOS di sekolah, pemahaman fungsi peranan BOS yang sesungguhnya kepada wali murid bahwa BOS ialah subsidi umum dan bukan saja sebagai subsidi khusus bagi siswa miskin melainkan memfasilitasi dan mengcover biaya biaya kegiatan belajar mengajar di sekolah secara keseluruhan termasuk siswa miskin. Sedangkan pada dimensi partisipatif diberlakukannya evaluasi pada pelaksanaan BOS lebih memperbaiki sisi fungsi kontrol atau peranan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan program BOS di sekolah tersebut telah berjalan sesuai prosedur juklak juknis yang dijadikan pedoman.

2. Faktor faktor penghambat dan pendukung evaluasi implementasi pemanfaatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan SDN Bulusari

- Faktor penghambat internal

Masalah pada proses penyusunan laporan pertanggung jawaban dana BOS yang selalu ditentukan waktu datelinenya sehingga laporan penyelesaian pertanggungjawaban menuntut Tim pelaksana harus tepat waktu dalam menyelesaikan laporan tersebut.

- Faktor pendukung internal

Masih belum optimalnya pengelolaan BOS oleh pihak sekolah karena keberadaan dana BOS yang ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk keperluan sekolah yang utama yakni, membiayai dan memfasilitasi pendidikan siswa miskin.

- Faktor pendukung eksternal

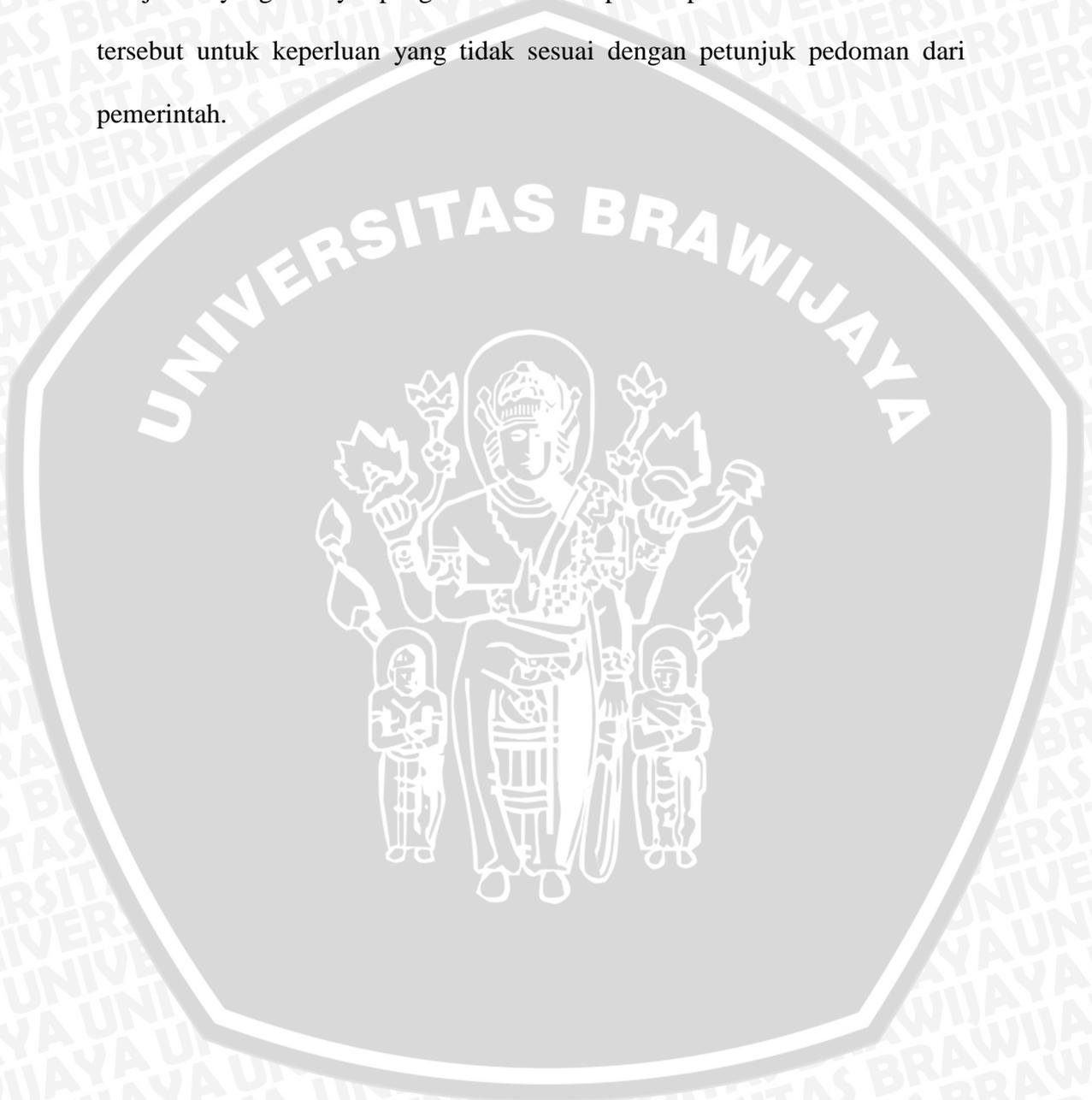
Masih adanya anggapan dan pemahaman dari para orang tua wali murid bahwa Program BOS adalah bantuan khusus untuk siswa miskin, padahal BOS sendiri adalah bukan sekedar bantuan khusus namun mencakup untuk biaya operasional keseluruhan bagi semua pelayanan pendidikan siswa di sekolah

V.II. SARAN

1. Searah dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, hendaknya pemanfaatan dana BOS benar benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar serta sesuai dengan buku petunjuk pada Panduan BOS yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena komitmen sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS sangat menentukan keberhasilan dari pada program BOS baik dalam lingkup internal sekolah.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai kerjasama yang lebih intens lagi antara pihak pengelola yakni kepala sekolah, bendahara sekolah, beserta komite sekolah dengan wali murid agar supaya proses implementasi BOS tidak ada

kesalahfahaman mengenai pengertian BOS bagi wali murid, kemudian dalam pelaksanaannya BOS lebih trnaspansi dan akuntabel.

3. Perlu adanya sanksi pelanggaran yang tegas terhadap tim pelaksana dan objek kebijakan yang menyimpang serta memanipulasi pemanfaatan dana BOS tersebut untuk keperluan yang tidak sesuai dengan petunjuk pedoman dari pemerintah.



Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta
- _____,2010 *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi dan Abdul Jabar Cipi Safrudin, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____,2008, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan edisi ke 2*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Beni Setiawan, 2007, *Direktorat Pemantauan Dan Evaluasi Bapenas*, Bapenas, Jakarta
- Dewi Rosalina Aris, 2008, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi BOS se kota Tangerang*, Fisip, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dimyatidan Mudjiono,2006, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djudju Sudjana, 2006, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung : PT,Rosdakarya
- Dwidjowijoto Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta..
- Fattah Nanang, 2004, *Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Farida Yusuf, 2000, *Konsep Model Evaluasi Implementasi Program Pendidikan*, Bumi Aksara,Jakarta.
- Gaffar, M. Fakry. (2000) *Pembiayaan Pendidikan: Permasalahandan Kebijakan dalam Perspektif Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: IKIP Bandung.
- Handayaniingrat, Suwarno. 1990. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Gunung Agung.
- Hubberman, A. M. & Miles, M. B. 2009 *Analisis Data Kualitatif (terjemahan)*.Jakarta: UI-PRES
- Keban Yeremias T 2008, *Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori, dan, Isu*, Gava Media, Yogyakarta.

Majalah Diknas Kabupaten Kediri, 2012 Pelaksanaan BOS di Kabupaten Kediri

Manullang. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mulyatiningsih Endang 2011, *Evaluasi Proses Suatu Program*, Bumi Aksara, Jakarta.

Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Radar Kediri, 2012, tentang Masalah penyelenggaraan implementasi BOS di Kabupaten Kediri.

Shadily dan Echols, 2000, Kamus Terjemahan Bahasa Inggris Indonesia, Jakarta: UI-PRES

Siagian, S.P. 2008. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung

Suyanto, Bagong. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana. Alfabeta

—-. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta

Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

UNESCO, 2012, *Human Development Index*, Indek Pembangunan Manusia

Yunanda Ari, 2010, *Evaluasi Program Pendidikan pada Pendidikan Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.

2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang – Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.

2011, Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mengenai jumlah siswa SD di kabupaten Kediri

2011 Renstra Kmendikbud Mengenai Pembangunan Pendidikan

2012, *Pedoman Program BOS Pendidikan Dasar*, Jakarta

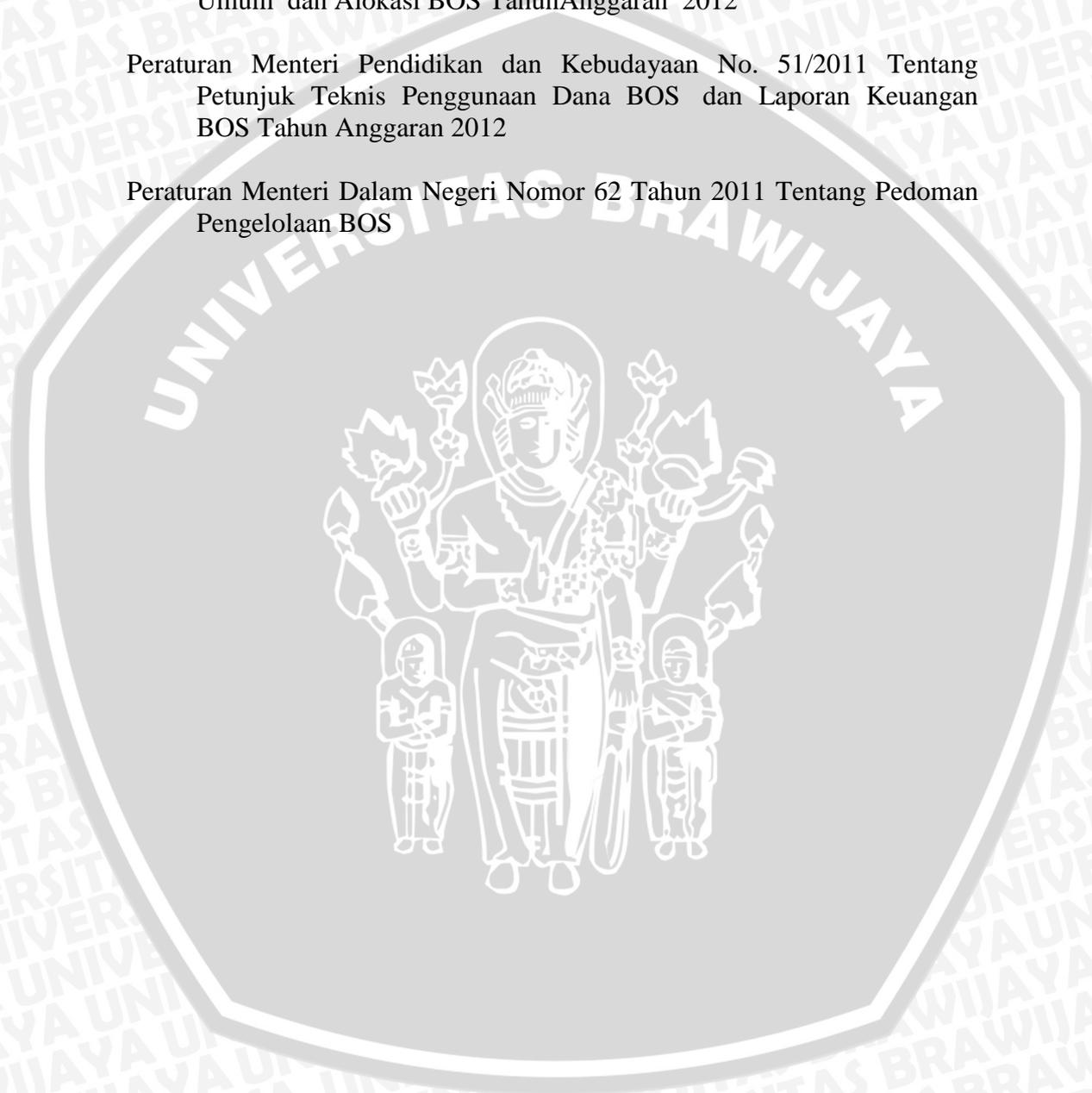
Peraturan dan Perundang-Undangan

2003, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistim Pendidikan Nasional*, Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS



Daftar lampiran

Dokumentasi foto Peneliti



Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas



Upacara Hari senin



Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BOS

Sosialisasi mengenai transparansi pengelolaan BOS dan kegiatan penerimaan rapor semester



Sesi wawancara peneliti dengan Pengelola BOS



PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa sajakah yang menjadi pengelola BOS di Sekolah ini ?
2. Sejauhmanakah sosialisasi mengenai BOS di Sekolah telah dilakukan ?
3. Kontribusi apa yang telah diberikan BOS di Sekolah kepada siswa selaku objek kebijakan BOS ?
4. Pernahkah terjadi permasalahan pada pemanfaatan dana BOS seperti kurangnya jumlah dana dalam menutup keuangan sekolah. Jika ada, mengapa, dan apa yang harus dilakukan ?
5. Adakah evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan BOS di sekolah ? jika ada apakah yang mendasari dan jelsakan landasan hukumnya ?
6. Bagaimanakah proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan BOS di sekolah ?
7. Langkah langkah apa sajakah yang dilakukan dalam evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana BOS pada sekolah tersebut dan bagaimanakah dampak sesudah pelaksanaan Evaluasi ?
8. Apa sajakah yang menjadi pendukung dan menghambat/kendala pada penyelenggaraan BOS di Sekolah ini ?
9. Bagaimanakah kontribusi evaluasi terhadap terhadap penyelenggaraan pelaksanaan BOS di sekolah ?



